



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGGUNAAN

*GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
OF JAWA BARAT BY EXPENDITURE*

2010 - 2012



Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT PENGGUNAAN**

*Gross Regional Domestic Product of Jawa Barat
by Expenditure*

2010 - 2012

<http://jabar.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

**Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat
Menurut Penggunaan
2010 – 2012**

ISSN : 0854.9303
Nomor Publikasi : 32550.1202
Katalog BPS : 9207.32
Ukuran Buku : 6.6 inchi x 10 inchi
Jumlah Halaman : 68 + vii halaman

Naskah :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :

BPS Provinsi Jawa Barat

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

PENGANTAR

Dalam rangka pembenahan struktur perekonomian suatu wilayah perlu dilakukan mapping atau pemetaan profil perekonomian secara akurat yang tentunya memerlukan data yang representatif. PDRB, baik menurut lapangan usaha maupun penggunaan, merupakan indikator yang paling lazim digunakan untuk mencermati dinamika perekonomian menurut sektor yang memproduksi maupun komponen yang menggunakan. PDRB menurut penggunaan merupakan salah satu penyajian perekonomian daerah yang dilihat dari sisi permintaan (*demand side*). PDRB menurut penggunaan terdiri atas komponen Pengeluaran Konsumsi (Rumahtangga, Pemerintah dan Lembaga non Profit), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Inventori, dan Ekspor serta Impor.

Penghitungan komponen-komponen tersebut menghasilkan beberapa indikator ekonomi yang menjadi tolok ukur kinerja perekonomian makro di Jawa Barat, diantaranya struktur perekonomian Jawa Barat, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat, kuantitas investasi yang terbentuk dalam hal ini pembentukan modal tetap yang ditunjukkan oleh komponen PMTB, serta kinerja ekspor dan impor.

Publikasi ini menyajikan PDRB Menurut Penggunaan dalam *series* tiga tahun, yakni tahun 2010 -2012, agar tergambar perkembangan perekonomian Jawa Barat, khususnya dari sisi permintaan, pada tiga tahun terakhir. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perencana dan pengambil kebijakan untuk menentukan arah pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

Atas bantuan dari berbagai pihak sehingga tersusunnya publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, Maret 2013
BPS Provinsi Jawa Barat
Kepala,

Gema Purwana, SE, M.Si
NIP. 19551003 197703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
BAB II. METODOLOGI	5
2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6
2.1.1. Konsep dan Definisi	6
2.1.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data	7
2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	11
2.2.1. Konsep dan Definisi	11
2.2.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data	12
2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	12
2.3.1. Konsep dan Definisi.....	12
2.3.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	13
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	14
2.4.1. Konsep dan Definisi.....	14
2.4.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	14
2.5. Perubahan Inventori.....	15
2.6. Ekspor dan Impor.....	15
2.6.1. Konsep dan Definisi.....	15
2.6.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data.....	16
BAB III. TINJAUAN EKONOMI REGIONAL MENURUT PENGGUNAAN	18
3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	22

3.2.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit.....	31
3.3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	33
3.4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	34
3.5.	Perubahan Inventori.....	40
3.6.	Ekspor dan Impor.....	42
3.7.	Sumber Laju Pertumbuhan (<i>Source of Growth/SOG</i>)	52
3.8.	Kesimpulan	54

<http://jabar.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Jawa Barat menurut Penggunaan Atas dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012 (jutaan rupiah)	20
Tabel 2.	PDRB adh Berlaku, PMTB, Persentase PMTB terhadap Total PDRB dan <i>Source of Growth</i> PMTB Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012.....	36
Tabel 3.	Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2010-2012	45
Tabel 4.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2012.....	53

<http://jabar.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan Peranan Komponen PDRB Penggunaan Atas dasar Harga Berlaku di Jawa Barat Tahun 2010-2012.....	21
Grafik 2.	MPC (<i>Marginal Propensity to Consume</i>), PDRB dan Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012 Provinsi Jawa Barat (Triliun Rp).....	23
Grafik 3.	Peranan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen).....	25
Grafik 4.	Nilai Konsumsi Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Rp Triliun).....	26
Grafik 5.	KRT perkapita dan LPE perkapita serta Laju Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012.....	27
Grafik 6.	KRT perkapita atas dasar harga Konstan (Rp Juta) dan Laju Pertumbuhannya (Persen) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012.....	28
Grafik 7.	Proporsi Pinjaman Yang diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan Tahun 2010-2012 di Provinsi Jawa Barat (Persen)	29
Grafik 8.	Proporsi Impor Komoditas Utama Menurut Klasifikasi BEC Tahun 2010-2012 di Provinsi Jawa Barat.....	30
Grafik 9.	Nilai Konsumsi LNPRT dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2010-2012.....	32
Grafik 10.	Nilai Konsumsi Pemerintah dan Laju Pertumbuhan Tahun 2010-2012 di Provinsi Jawa Barat	33
Grafik 11.	Peranan Konsumsi Pemerintah Tahun 2010-2012 di Provinsi Jawa Barat....	34
Grafik 12.	PMTB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2010-2012.....	35
Grafik 13.	Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PMTB Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen).....	37
Grafik 14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012.....	38
Grafik 15.	Persentase Nilai Investasi PMA di Jawa Barat Menurut Negara Asal Tahun 2012.....	39
Grafik 16.	Nilai Perubahan Inventori (Juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Perubahan Inventori Jawa Barat Tahun 2010-2012	41
Grafik 17.	Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)	42

Grafik 18.	Nilai Ekspor (Juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekspor (Persen) Jawa Barat Tahun 2010-2012	43
Grafik 19.	Peranan Komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)	44
Grafik 20.	Peranan Komoditas Ekspor Non Migas Utama Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)	46
Grafik 21.	Tiga Besar Negara Tujuan Ekspor Non Migas Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)	47
Grafik 22.	Nilai Impor (Juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Impor (Persen) Jawa Barat Tahun 2010-2012	48
Grafik 23.	Peranan Komponen Impor Barang dan jasa Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)	49
Grafik 24.	Peranan Komoditas Impor Non Migas Utama Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)	50
Grafik 25.	Tiga Besar Negara Asal Impor Non Migas Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)	51
Grafik 26.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2012 (Persen).....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Juta Rupiah).....	60
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Juta Rupiah).	61
Lampiran 3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Persen).....	62
Lampiran 4.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Persen).....	63
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Persen).....	64
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Persen).....	65
Lampiran 7.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Jawa Barat Menurut Penggunaan Tahun 2009-2011 (Tahun 2000 = 100,00) (Persen).....	66
Lampiran 8.	Inflasi Tahun 2009-2011 (Persen).....	67
Lampiran 9.	Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011 (jutaan rupiah).....	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional di negara Indonesia memiliki tantangan yang relatif lebih besar di bandingkan dengan pembangunan di negara-negara lain. Secara geografis, tentunya bukan merupakan hal yang mudah untuk mengelola wilayah seluas 1,9 juta km² yang tersebar berupa formasi lebih dari 17.000 pulau. Apalagi secara demografis, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-empat di dunia serta memiliki tingkat keragaman karakteristik penduduk yang cukup tinggi.

Untuk dapat membangun negara seluas dan sebesar Indonesia, semua komponen bangsa, tidak bisa tidak, harus bahu membahu berkontribusi kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta bersama-sama membumikan visi yang berorientasi kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Upaya mensejahterakan bangsa Indonesia tetap harus berlangsung sekalipun iklim ekonomi dunia sedang tidak bersahabat. Berkat kerja keras seluruh elemen bangsa, dua tahun terakhir ini Indonesia tetap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tengah turbulensi ekonomi dunia akibat dari krisis di zona Eropa. Hanya beberapa negara di dunia yang ekonominya dapat tumbuh lebih tinggi dari Indonesia pada periode pasca dimulainya krisis Eropa belakangan ini. Hal itu salah satunya dikarenakan struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh permintaan domestik (yang tercermin dari komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga dan konsumsi pemerintah) sehingga relatif tahan terhadap gejolak yang terjadi di luar negeri.

Ada beberapa aspek lain pembangunan yang masih memerlukan perhatian serius, dimana aspek utama adalah pemerataan hasil-hasil

pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa “kue” pembangunan belum dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyak elemen rakyat yang masih termarginalisasi sehingga belum tersentuh pembangunan. Dengan demikian pemerataan masih merupakan pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia, baik pemerataan secara vertikal, yaitu mereduksi gap antara golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, maupun pemerataan secara horisontal, yaitu mempersempit jurang kesejahteraan secara spasial antar wilayah di Indonesia. Sehingga pada prinsipnya masih banyak aspek dalam struktur perekonomian Indonesia yang perlu dibenahi.

Untuk dapat melakukan pembenahan struktur perekonomian di negara kita. Perlu dilakukan mapping atau pemetaan profil perekonomian secara akurat. Tentunya, untuk efektifitas jalannya pembangunan, perlakuan/intervensi yang dilakukan akan sangat berbeda untuk wilayah dengan sumber pertumbuhan berbeda. Dengan kata lain, akan jauh lebih efektif kebijakan peningkatan produksi (*supply push*) yang dilakukan melalui strategi tarikan permintaan (*demand pull*). Kebijakan yang hanya memprioritaskan peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan sisi permintaan akan menyebabkan penurunan tingkat harga, khususnya di tingkat produsen sehingga berdampak pada kelesuan dan akhirnya bermuara pada melemahnya kembali kinerja yang telah dibangun.

Dari uraian di atas, maka untuk mencapai efektifitas program-program dalam menstimulus LPE, tentunya tidak hanya dibutuhkan data tentang struktur produksi barang/jasa per sektor ekonomi (digambarkan oleh data PDRB menurut lapangan usaha), namun juga informasi tentang struktur penggunaan barang/jasa yang merefleksikan struktur permintaan di suatu wilayah (digambarkan oleh data PDRB menurut penggunaan).

Pendekatan yang akan disajikan dalam publikasi ini adalah penghitungan PDRB menurut penggunaan. Data agregat yang dapat diukur dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan adalah konsumsi akhir, pembentukan modal, perubahan inventori dan net ekspor. Konsumsi akhir menggambarkan pendapatan masyarakat/institusi yang dibelanjakan untuk mengkonsumsi produk domestik yang dihasilkan, pembentukan modal merupakan bagian dari suatu proses investasi fisik secara keseluruhan, perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bermakna pertambahan atau pengurangan, selanjutnya *net ekspor* adalah selisih antara angka ekspor dengan impor, baik antar negara maupun antar provinsi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penghitungan PDRB digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah serta menggunakan tiga macam pendekatan yaitu (1) pendekatan produksi mengukur tingkat produktivitas suatu wilayah, (2) pendekatan penggunaan mengukur bagian produk regional yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, pembentukan modal dan ekspor (3) pendekatan pendapatan mengukur balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki atau dikuasai oleh penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Data PDRB ini dapat digunakan untuk mengamati indikator-indikator ekonomi makro untuk menganalisis perekonomian dalam menentukan arah kebijakan serta mengevaluasi hasil pembangunan antara lain laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya. Di sisi lain, indikator ekonomi memerlukan analisis dari sisi permintaan (*demand*). Data yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran indikator ekonomi dari sisi *demand* tersebut adalah PDRB yang dihitung menurut penggunaan.

Penulisan publikasi ini dimaksudkan dan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan data indikator makro ekonomi dari sisi permintaan. Ketersediaan data tersebut adalah usaha untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sangat membutuhkan gambaran tentang ukuran kinerja pembangunan dan penetapan strategi-strategi yang akan dilakukan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Data PDRB Penggunaan Jawa Barat merupakan potret kinerja pembangunan ekonomi makro Jawa Barat yang dilihat dari sisi permintaan yang terdiri dari komponen Konsumsi, Investasi dan Ekspor-Impor. Selain itu, PDRB menurut penggunaan juga dapat digunakan untuk melihat sumber-sumber pertumbuhan di wilayah Jawa Barat yang diharapkan menjadi pijakan kuat untuk alat perencanaan bagi Pemerintah Daerah serta sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi masyarakat pengguna data pada umumnya.

BAB II METODOLOGI

PDRB menurut penggunaan (*expenditure*) merupakan gambaran penggunaan barang/jasa yang diproduksi oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Struktur penggunaan produk barang dan jasa secara makro merupakan refleksi dari permintaan (*demand*) suatu wilayah terhadap produk barang/jasa. Secara umum, permintaan barang/jasa terbagi dalam dua bagian besar yaitu Permintaan Antara (*Intermediate Output*) dan Permintaan Akhir (*Final Demand*). Permintaan antara adalah produk barang/jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan/proses produksi pada unit usaha lainnya. Sedangkan permintaan akhir adalah produk barang/jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir untuk rumahtangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga (LNPR) dan pemerintah; kebutuhan investasi untuk unit usaha; dan kebutuhan luar wilayah (ekspor) .

Berdasarkan teori keseimbangan, dengan adanya produksi (*supply*) dan permintaan (*demand*), maka terjadi proses transaksi ekonomi. Dari sisi produsen transaksi tersebut menciptakan pendapatan, sedangkan dari sisi konsumen menimbulkan pengeluaran. Hubungan antara pendapatan dan pengeluaran terhadap barang dan jasa dapat ditulis sebagai berikut :

**PDRB SAMA DENGAN NILAI SELURUH PENGELUARAN AKHIR
DIKURANGI DENGAN NILAI TOTAL IMPOR**

Pengeluaran akhir merupakan pembelian dari semua barang/jasa (untuk kebutuhan konsumsi rumahtangga dan LNPR, konsumsi pemerintah, barang modal, perubahan persediaan, seluruh barang/jasa yang diekspor) yang disuplai dalam suatu perekonomian. Nilai pengeluaran akhir tersebut akan melebihi output

yang diproduksi unit kegiatan ekonomi domestik dengan nilai sebesar nilai total impor barang dan jasa. Sehingga nilai produksi domestik akan diperoleh dari selisih pengeluaran akhir dengan total impor, yang persamaannya dapat ditulis :

$$Y = C_h + C_n + C_g + I_i + I_s + X - M \quad \text{..... (1)}$$

dimana :

C_h : Konsumsi Rumah Tangga (*Household*)

C_n : Konsumsi Lembaga Non Profit (*Non Profit Institution*)

C_g : Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan (*Government*)

I_i : Pembentukan Modal Tetap Bruto (*Investment*)

I_s : Perubahan Inventori (*Capital Stock*)

X : Ekspor

M : Impor

Y : PDRB.

Dari persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi :

$$Y = C + I + X - M \quad \text{..... (2)}$$

di mana :

C : Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), Pemerintah dan Pertahanan

I : Investasi

X : Ekspor

M : Impor

2.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2.1.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran

atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran. Pengeluaran tersebut termasuk pembelian aktiva berwujud yang tidak dapat diproduksi kembali (kecuali tanah) seperti hasil karya seni, barang-barang koleksi dan barang antik. Termasuk juga pembelian barang tahan lama seperti meubeler, sepeda motor, mobil dan barang elektronik (komputer, TV, radio) dan imputasi sewa rumah sendiri. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meliputi nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk konsumsi sendiri seperti hasil kebun, peternakan, kayu bakar dan biaya hidup lainnya serta barang-barang dan jasa.

Di samping itu pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, telepon dan lain-lain merupakan konsumsi rumah tangga.

2.1.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- 1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).
- 2). Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi butir satu di atas, ditambah pembelian langsung penduduk daerah ini yang dilakukan di luar negeri atau daerah lain, dikurangi pembelian langsung di pasar domestik oleh rumah

tangga di luar penduduk daerah tersebut (staf kedutaan asing dan turis domestik maupun asing).

Dalam kasus batas, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh penduduk yang sedang melakukan perjalanan ke daerah lain (dalam atau luar negeri) baik dalam rangka bertugas, urusan bisnis atau untuk keperluan lainnya sudah terhitung di rumah tangga yaitu melalui konsumsi perkapita.

Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Jawa Barat. Dari hasil Susenas diperoleh data rata-rata konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok makanan dan rata-rata konsumsi perkapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi menggunakan rata-rata harga eceran dari Statistik Harga Konsumen Provinsi Jawa Barat. Di samping itu digunakan data lainnya seperti PDRB perkapita atas dasar harga konstan, Indeks Harga Konsumen (IHK) dan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pengeluaran konsumsi kelompok makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- 1). Makanan, yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan dan udang segar dan sejenisnya, ikan dan udang yang diawetkan dan sejenisnya, daging segar, daging yang diawetkan, hasil ikutan daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, bumbu-bumbuan dan konsumsi bahan makanan lainnya.
- 2). Makanan dan minuman jadi.
- 3). Tembakau dan sirih, yang meliputi rokok putih, rokok kretek, cerutu dan tembakau.

Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terdiri dari pengeluaran untuk :

- a). Perumahan, bahan bakar, air dan penerangan.
- b). Aneka barang dan jasa.
- c). Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
- d). Pajak dan asuransi.
- e). Keperluan untuk pesta dan upacara.

Total pengeluaran konsumsi rumah tangga keseluruhan diperoleh dari pengeluaran perkapita setahun dikalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkiraan pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk tahun-tahun yang tidak ada data Susenasnya dihitung berdasarkan elastisitas pendapatan dari Susenas yang ada.

a. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan

Perkiraan konsumsi kelompok makanan digunakan model fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa setiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi, tetapi pada suatu saat (titik jenuh) konsumsi tersebut mulai menurun, dengan bentuk kurva seperti parabola.

Fungsi eksponensial tersebut adalah:

$$Q_i = a \cdot Y_i^b$$

di mana :

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas.

Koefisien elastisitas (b) yang telah diuji digunakan untuk memperkirakan

konsumsi perkapita pada tahun yang tidak ada data Susenasnya. Konsumsi perkapita tahun lainnya dapat diperkirakan dengan menggunakan peubah lain yaitu perubahan pendapatan perkapita (atas dasar harga konstan), dan data konsumsi perkapita (Susenas) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C_{n+1} = C_n + (C_n \cdot dp \cdot b)$$

di mana :

C_{n+1} : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun ke-(n+1)

C_n : Rata-rata konsumsi (kuantum) perkapita sebulan pada tahun dasar ke-(n)

dp : Perubahan pendapatan perkapita harga konstan tahun ke-n dengan tahun ke-(n+1)

b : Koefisien elastisitas.

Nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan konsumsi dalam satuan kuantum dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dan harga di pedesaan. Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metoda *revaluasi* artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar.

b. Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Bukan Makanan

Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menggunakan model regresi linier. Artinya, setiap kenaikan pendapatan akan selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan misalnya permintaan akan pakaian, dan lain sebagainya. Model yang digunakan

sebagai berikut :

$$Q_i = a + (b \cdot Y_i)$$

di mana :

Q_i : Rata-rata konsumsi perkapita sebulan (kuantum)

Y_i : Pendapatan perkapita sebulan

a : Konstanta

b : Koefisien elastisitas

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada tahun-tahun dimana data Susenas tersedia, diperoleh dengan cara mendeflasi nilai konsumsi (nilai data Susenas) dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi.

Pada tahun-tahun dimana data Susenas tidak tersedia maka nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan metode model regresi linier yang menghasilkan koefisien elastisitas permintaan yang dikalikan dengan pendapatan, kemudian mengalikan total nilainya dengan IHK.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

2.2.1. Konsep dan Definisi

Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk atau dibiayai oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan jasa pelayanan yang bersifat non komersial khususnya bagi anggota masyarakat umum tanpa adanya motivasi untuk meraih keuntungan.

Bentuk LNP yang melayani rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Kemasyarakatan,

2. Organisasi Sosial,
3. Organisasi Profesi,
4. Perkumpulan Sosial / Kebudayaan / Olah raga dan Hobi,
5. Lembaga Swadaya Masyarakat,
6. Lembaga Keagamaan,
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan / Beasiswa.

2.2.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penyusunan perkiraan konsumsi LNPRT dilakukan dengan menggunakan metoda langsung dari hasil survei khusus yaitu diperoleh dari penjumlahan output sub sektor jasa sosial dan kemasyarakatan dikurangi surplus usahanya.

Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 sesuai dengan kegiatan masing-masing subsektornya, seperti penghitungan menurut lapangan usaha yaitu metode deflasi dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang sesuai dengan masing-masing kegiatan, atau ekstrapolasi dengan menggunakan indeks jumlah unit kegiatan atau indeks jumlah tenaga kerja.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

2.3.1. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai nilai output atas pelayanan pemerintah dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya yang tidak dapat dipisahkan. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sama dengan nilai barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah untuk konsumsinya pada saat itu.

Output pemerintah tidak dijual sehingga nilainya diukur dengan biaya produksinya, yaitu jumlah konsumsi antara, konsumsi pegawai, konsumsi modal tetap dan pajak tak langsung. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini mencakup pemerintah

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Nilai barang dan jasa yang dikonsumsi sendiri oleh pemerintah tidak dapat diperoleh secara langsung karena produksi sektor ini tidak dijual. Oleh karena itu untuk memperoleh nilainya diperkirakan dari besarnya biaya produksi yang dikeluarkan.

2.3.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penghitungan konsumsi pemerintah menggunakan data laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Desa yang diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3. Laporan keuangan tersebut meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pensiun dan subsidi, belanja pemeliharaan barang, belanja perjalanan dinas dan belanja rutin lainnya.

Selain itu digunakan juga Neraca Produksi Pemerintah Pusat dan Pertahanan Keamanan (atas dasar harga berlaku) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah serta Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja pembangunan atas dasar harga berlaku diperoleh dari daftar K.1, K.2 dan K.3.

Untuk memperkirakan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dilakukan pendekatan sebagai berikut :

- 1). *Ekstrapolasi* belanja pegawai dengan indeks jumlah pegawai.
- 2). *Deflasi* belanja barang dengan IHPB tanpa ekspor tahun yang sesuai.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

2.4.1. Konsep dan Definisi

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meliputi seluruh pengeluaran untuk unit produksi yang menambah daya produksi aktiva tetap dikurangi dengan penjualan dari barang-barang modal bekas ditambah penjualan barang-barang lain yang berasal dari daerah atau negara lain.

Secara rinci, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdiri dari :

- a). Penambahan bersih (baru atau bekas) oleh produsen, asset berwujud yang dapat diproduksi kembali yang mempunyai umur satu tahun atau lebih dan digunakan bukan untuk keperluan militer.
- b). Pengeluaran atas peningkatan dan perubahan barang-barang modal yang diharapkan memperpanjang umur barang tersebut atau dapat meningkatkan produktivitasnya.
- c). Pengeluaran atas reklamasi tanah dan perbaikannya, pengembangan dan perluasan perkebunan, pertambangan, hutan, lahan pertanian dan perikanan.
- d). Penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil tenaga, susu, bulu dan pembibitan ternak potong.

2.4.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Pembentukan Modal Tetap Bruto dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing lapangan usaha. Di samping itu, pembentukan modal dapat juga dihitung berdasarkan arus barang atau *Commodity Flow*.

Pembentukan modal tetap menurut lapangan usaha mencakup sembilan sektor, yaitu :

- 1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,

- 2). Pertambangan dan Penggalian,
- 3). Industri Pengolahan,
- 4). Listrik, Gas dan Air Bersih,
- 5). Bangunan,
- 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran,
- 7). Pengangkutan dan Komunikasi,
- 8). Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
- 9). Jasa-jasa.

2.5. Perubahan Inventori

Data mengenai nilai perubahan inventori dalam komponen PDRB masih merupakan perkiraan kasar, karena dihitung dari selisih PDRB dengan komponen permintaan akhir lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor neto. Dengan demikian, didalamnya masih terkandung selisih statistik (*Statistical Discrepancy*) yang terdapat pada sektor atau komponen lainnya.

2.6. Ekspor dan Impor

2.6.1. Konsep dan Definisi

Ekspor barang dan jasa merupakan suatu komponen dari permintaan akhir, tetapi impor merupakan sumber penyediaan barang dan jasa, oleh karena impor bukan merupakan produksi domestik jadi harus dikurangkan dari total penggunaan dalam PDRB.

Ekspor dan impor barang dan jasa meliputi angkutan dan komunikasi, jasa asuransi serta barang dan jasa lain seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi penjualan di luar daerah

dan pembayaran biaya kantor pusat perusahaan induk oleh cabang dan anak perusahaan di luar daerah.

Pembelian langsung di pasar suatu daerah oleh bukan penduduk termasuk ekspor barang dan jasa, serta pembelian di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai impor. Pengeluaran untuk biaya perjalanan yang dibayar oleh majikan diperlakukan sebagai ekspor dan impor barang dagangan dan bukan sebagai pembelian langsung.

Yang tidak termasuk ekspor dan impor barang adalah barang milik penduduk atau bukan penduduk suatu daerah yang melintasi batas geografis suatu daerah karena merupakan tempat persinggahan, barang untuk peragaan, barang contoh dan barang untuk keperluan sehari-hari wisatawan mancanegara/domestik.

Ekspor barang antar negara dinilai dengan harga *f.o.b. (free on board)*, sedangkan impor barang dinilai dengan harga *c.i.f. (cost, insurance and freight)*. Ekspor jasa dinilai pada saat jasa tersebut diberikan ke bukan penduduk, sedangkan impor jasa dinilai pada saat jasa diterima oleh penduduk.

Penduduk yang dimaksud di sini adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan negara serta lembaga swasta non profit yang berada di daerah tersebut.

2.6.2. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Data ekspor dan impor Jawa Barat masih sangat terbatas. Data yang dapat diperoleh hanya transaksi dengan luar negeri. Data transaksi dengan luar negeri diperoleh dari Statistik Ekspor Impor terbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ekspor impor antar pulau/Provinsi diperoleh dari Statistik Bongkar Muat, Terminal Bis, Angkasa Pura melalui Dinas Bea dan Cukai.

Data lain yang diperlukan adalah IHPB untuk ekspor dan impor yang diperoleh dari Buletin Ringkas terbitan BPS dan juga data Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor dan impor yang diperoleh dari transaksi barang dan jasa dengan luar negeri dan antar pulau/Provinsi merupakan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku.

Ekspor dan impor antar negara merupakan ekspor impor antar negara menurut pelabuhan di Jawa Barat, sedangkan ekspor impor antar pulau/Provinsi menggunakan ratio Input-Output Jawa Barat. Nilai ekspor impor atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mendeflasikan nilai ekspor impor atas dasar harga berlaku dengan IHPB untuk ekspor dan impor.

<http://jabar.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN EKONOMI REGIONAL MENURUT PENGGUNAAN

Menurut Prof. Suahasil Nazara, PhD., peran Pemerintah Daerah dalam strategi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia adalah terdapat tiga hal yang dapat diadopsi. Pertama, Pemerintah Daerah sebagai **pusat pertumbuhan ekonomi** yang dimotori dunia usaha dan difasilitasi oleh Pemerintah; kedua, pembangunan sektoral yang berfokus kepada peningkatan daya saing dan *debottlenecking* serta ketiga, pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Penjelasan poin pertama adalah, dalam lingkup Nasional pembangunan kawasan ekonomi khusus di luar Pulau Jawa, berbasiskan partisipasi sektor usaha (Pengusaha Nasional dan Asing bermitra dengan BUMN dan BUMD). Diperlukan adanya desain pemberian **insentif** dan perlakuan khusus untuk mengundang sektor usaha membangun kawasan pertumbuhan ekonomi. Antisipasi kebutuhan dunia usaha (*demand-driven*) menjadi hal yang tidak dapat diabaikan serta membentuk penyediaan areal/lahan bagi penanam modal.

Berikutnya poin kedua mempunyai penjelasan, diperlukan simplifikasi perijinan dan peraturan daerah yang menunjang iklim investasi sehingga proses birokrasi menjadi efektif dan efisien, didukung oleh adanya pemberian insentif pajak daerah sehingga beban pengusaha dapat lebih diringankan. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap penanam modal serta mendukung sektor unggulan di daerah masing-masing. Penjelasan poin ketiga terkait dengan dukungan infrastruktur, yaitu : penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur terkait erat dengan pemerintah daerah sebagai pemangku wilayah. Kerjasama antardaerah dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas sehingga terintegrasi dalam satu kesatuan fungsi. Perubahan *mindset* masyarakat untuk mendukung

pembangunan infrastruktur dan konektivitas, hal tersebut dapat menjadi hal yang positif bagi pembangunan baik regional maupun nasional.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional masih harus memperjuangkan pemerataan pembangunan wilayahnya. Dengan kondisi geografis yang cukup kompleks, merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan konektivitas atau keterhubungan antar daerah yang saling mendukung. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat telah mulai bergeser ke wilayah Sukabumi dan Cianjur, sebelumnya terpusat di wilayah penyangga ibukota Negara serta di wilayah Bandung raya. Wilayah pantura juga menunjukkan performa pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan.

Pada sisi birokrasi dan regulasi, pemerintah provinsi Jawa Barat telah menerapkan strategi pelayanan prima terhadap proses perijinan bagi investor asing. Penyederhanaan juga dilakukan dengan adanya program pelayanan satu atap sehingga proses perijinan menjadi lebih efektif dan efisien. Iklim investasi di Jawa Barat sangat baik dan kondusif, berbagai program promosi telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Diharapkan dukungan dan keterlibatan setiap elemen masyarakat dalam proses pemerataan pembangunan sehingga harapan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dapat tercapai.

Sementara itu, secara nominal perekonomian Jawa Barat ditinjau dari sisi penggunaan menggambarkan permintaan akhir dari ketersediaan barang dan jasa yang berada dalam wilayah. Permintaan akhir tersebut berupa konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non pemerintah, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, inventori dan aktivitas ekspor impor.

Tabel 1.
PDRB Jawa Barat Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010-2012 (jutaan rupiah)

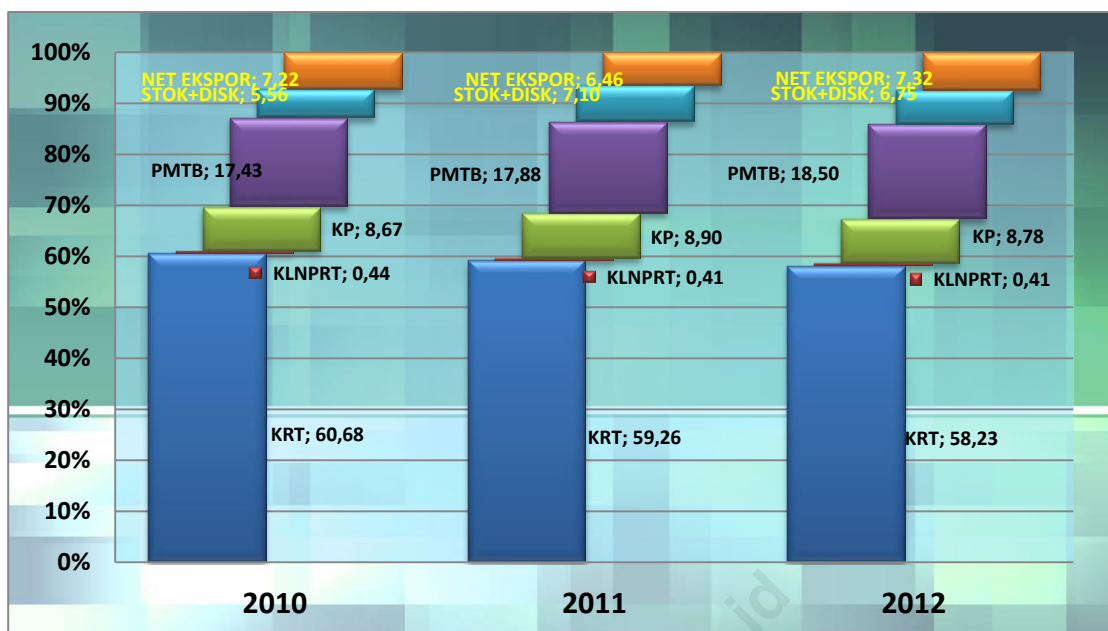
Uraian (1)	2010 (2)	2011 ^{*)} (3)	2012 ^{**)} (4)
1. Pengeluaran KRT	468.201.172,55	510.187.921,23	551.404.348,16
a. Makanan	253.489.713,89	274.837.301,85	298.382.700,46
b. Non Makanan	214.711.458,66	235.350.619,38	253.021.647,70
2. Konsumsi LNP	3.385.128,51	3.556.229,43	3.864.741,76
3. Konsumsi Pemerintah	66.915.973,18	76.610.187,98	83.123.604,43
4. PMTB	134.500.300,66	153.905.249,49	175.201.065,80
5. Inventori	30.343.120,03	39.453.621,17	48.468.148,56
Diskrepansi	12.527.099,61	21.633.754,13	15.465.676,84
6. Ekspor	274.297.190,36	305.330.654,95	340.280.727,23
a. Antar Negara	211.786.258,96	225.030.857,82	248.130.380,09
b. Antar Provinsi	47.697.569,45	65.742.078,52	75.645.740,05
c. Jasa	14.813.361,95	14.557.718,60	16.504.607,09
7. Impor	218.576.124,42	249.695.626,20	270.947.541,98
a. Antar Negara	100.648.080,56	132.150.596,83	127.642.061,13
b. Antar Provinsi	90.642.185,57	87.917.885,80	111.155.374,04
c. Jasa	27.285.858,29	29.627.143,57	32.150.106,81
Jumlah	771.593.860,48	860.981.992,17	946.860.770,81

^{*)} Angka diperbaiki

^{**)} Angka sementara

Selama tiga tahun terakhir (2010-2012) struktur PDRB dari sisi penggunaan Jawa Barat masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata *share* hampir mencapai 60 persen selama periode tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa di Jawa Barat permintaan akhir barang/jasa mayoritas dilakukan oleh rumah tangga. Fakta ini juga menjadi gambaran pola konsumsi masyarakat Jawa Barat yang cenderung konsumtif. Apabila dicermati selama tiga tahun *share* komponen ini memiliki *trend* yang semakin berkurang meski tipis. Harapannya kondisi ini mengindikasikan lebih menguatnya indikator lain seperti, investasi dan ekspor.

Grafik 1.
Perkembangan Peranan Komponen PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Barat, Tahun 2010 - 2012



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Komponen Pembentukan Modal Bruto memperlihatkan *trend* peningkatan *share* selama tiga tahun berturut-turut (2010-2012) yaitu berkisar antara 17-18 persen. Meski hanya mengalami peningkatan *share* yang tipis rata-rata satu persen per tahunnya namun fakta ini dapat memberikan sentimen positif terhadap perkembangan investasi fisik di Jawa Barat, dimana kegiatan investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong berkembangnya sektor riil yang berguna bagi peningkatan nilai tambah perekonomian wilayah.

Meski komponen ekspor memiliki nilai kedua terbesar dalam PDRB sisi penggunaan, akan tetapi untuk mengukur kinerjanya harus dikurangi dengan nilai komponen impor, hasil pengurangan kedua komponen tersebut dinamakan ekspor netto. Selama kurun tiga tahun (2010-2012) *share* ekspor netto memiliki *trend* yang fluktuatif. Pengaruh krisis global sedikit memberikan imbas negatif bagi aktivitas ekspor di Jawa Barat, hal ini terlihat dari penurunan *share* ekspor netto di

Tahun 2011 menjadi sebesar 6,46 persen dan meningkat menjadi 7,32 persen pada tahun 2012 .

Penjelasan secara mendalam mengenai kontribusi, kinerja serta fenomena yang terjadi sepanjang tahun 2010-2012 pada komponen-komponen pengeluaran dalam perekonomian Jawa Barat akan disajikan dalam pembahasan di bawah ini.

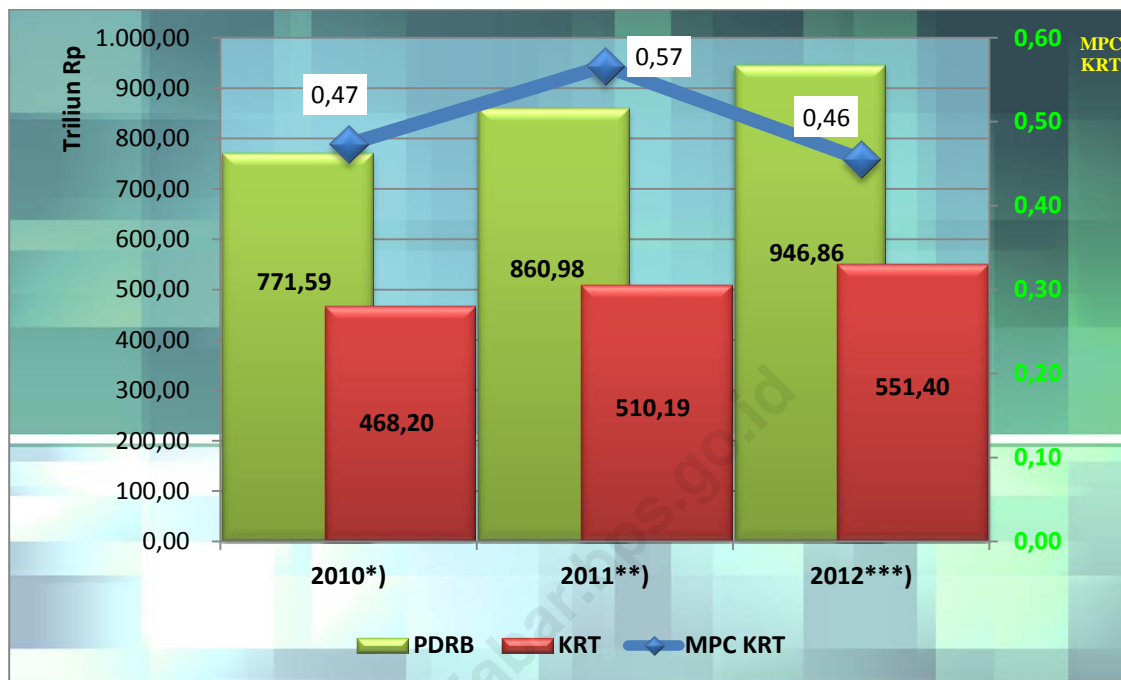
3.1. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga

Pertumbuhan golongan ekonomi menengah beberapa tahun terakhir menyebabkan dorongan yang cukup kuat terhadap perekonomian domestik. Perilaku konsumtif golongan menengah mendorong permintaan produk otomotif, sandang(fashion), asuransi, traveling dan alat komunikasi (gadget). Golongan tersebut mempunyai tuntutan yang luar biasa untuk memenuhi gaya hidup yang lebih premium. Golongan menengah tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kota yang lebih kecil, ditandai dengan semakin banyaknya supermarket, mall, dealer mobil, dealer motor dan pusat hiburan seperti bioskop. Krisis Eropa menyebabkan perekonomian Jawa Barat memperkuat ekonomi domestik yang diindikasikan oleh tingginya permintaan konsumsi terutama konsumsi rumahtangga.

Besarnya jumlah penduduk Jawa Barat merupakan target pasar yang potensial, hal tersebut menyebabkan pengeluaran konsumsi rumahtangga (KRT) memiliki nilai yang cukup dominan dalam perekonomian. Nilai KRT cenderung meningkat selama kurun waktu 2010-2012, yaitu sebesar Rp. 468 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 551 triliun pada 2012. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk, perubahan harga (inflasi) juga perubahan pendapatan rumahtangga. Di samping ketiga faktor tersebut peningkatan KRT juga disebabkan oleh pola tradisional masyarakat yang masih konsumtif, dimana

pengeluaran rumahtangga yang bersifat konsumsi masih dikedepankan dibandingkan dengan pembelian produk investasi.

Grafik 2.
MPC (*Marginal Propensity to Consume*), PDRB dan Konsumsi Rumahtangga Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012 Provinsi Jawa Barat (TriliunRp)



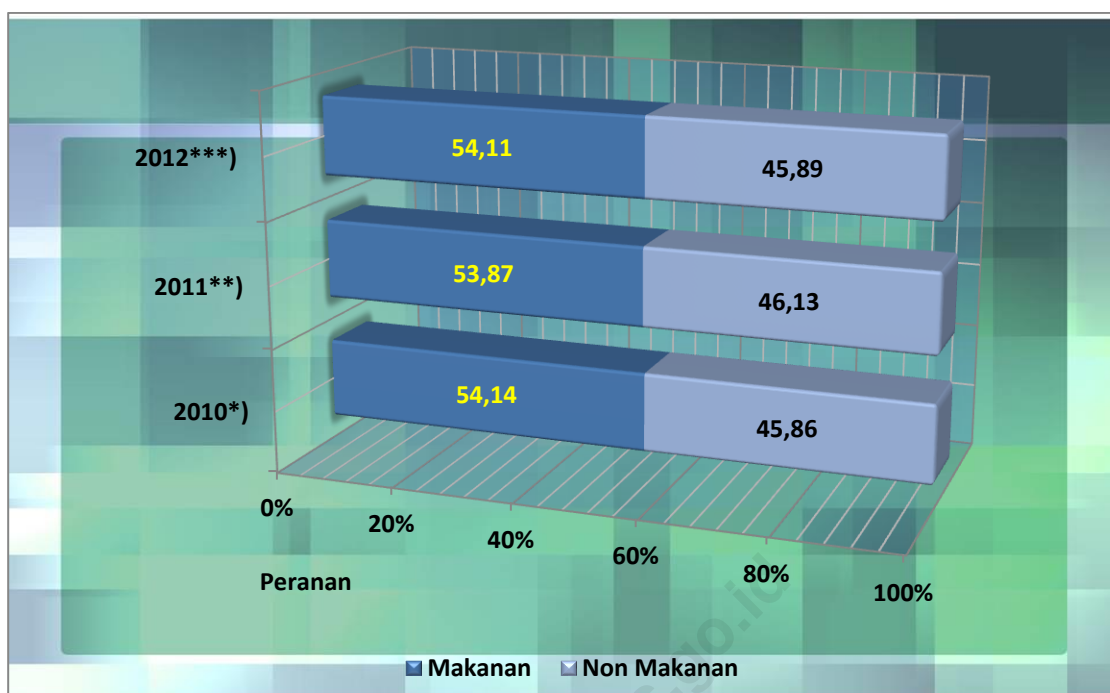
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

Pada grafik 2. terlihat bahwa peningkatan nilai konsumsi rumahtangga seiring dengan meningkatnya PDRB. Dengan asumsi peningkatan konsumsi dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan regional, dalam hal ini digunakan PDRB sebagai pendekatan pendapatan. Hubungan antara KRT dan PDRB digambarkan oleh besaran rasio MPC (*Marginal Propensity to Consume*). MPC menggambarkan pengaruh peningkatan KRT sebesar satu triliun rupiah terhadap peningkatan PDRB. Pada periode 2010-2012 rasio MPC mengalami pergerakan, pada tahun 2010 sebesar 0,47 artinya peningkatan KRT sebesar satu triliun rupiah mampu meningkatkan PDRB sebesar 470 miliar rupiah. Besaran MPC pada tahun 2011 mengecil menjadi hanya 0,57 yaitu setiap kenaikan KRT

sebesar satu triliun rupiah hanya mampu meningkatkan PDRB sebesar 570 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2012 besaran rasio MPC sedikit meningkat menjadi 0,46 artinya pada tahun 2012 peningkatan sebesar 1 triliun KRT menyebabkan meningkatnya PDRB sebesar 460 miliar rupiah. Konsumsi rumah tangga pada tahun 2011 mencapai puncaknya dan memberikan dorongan yang cukup kuat bagi perekonomian. Fenomena meningkatnya konsumsi kelas menengah yang mencapai puncaknya pada tahun 2011 terlihat dari besaran MPC yang cukup tinggi pada tahun tersebut yaitu 0,57.

Jika ditelaah lebih mendalam, peranan konsumsi makanan masih lebih besar daripada konsumsi non makanan. Struktur konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat menuju peralihan ke pola konsumsi modern, di mana konsumsi non makanan menjadi lebih besar daripada konsumsi makanan. Hal ini berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat yang sudah mulai beralih ke pemenuhan kebutuhan sekunder. Pada tahun 2010 peranan konsumsi makanan sebesar 54,14 persen sedangkan peranan non makanan sebesar 45,86 persen. Peranan konsumsi makanan cenderung semakin menurun pada tahun 2011 sebesar 53,87 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 54,11 persen. Sebaliknya peranan non makanan mengalami kecenderungan yang meningkat, pada tahun 2010 sebesar 45,86 persen meningkat menjadi 46,13 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 kembali menurun menjadi 45,89 persen. Peningkatan peranan konsumsi non makanan pada tahun 2011 didukung oleh fenomena peningkatan konsumsi oleh golongan ekonomi tingkat menengah.

Grafik 3.
Peranan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Terhadap Konsumsi
Rumahtangga Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012 (persen)

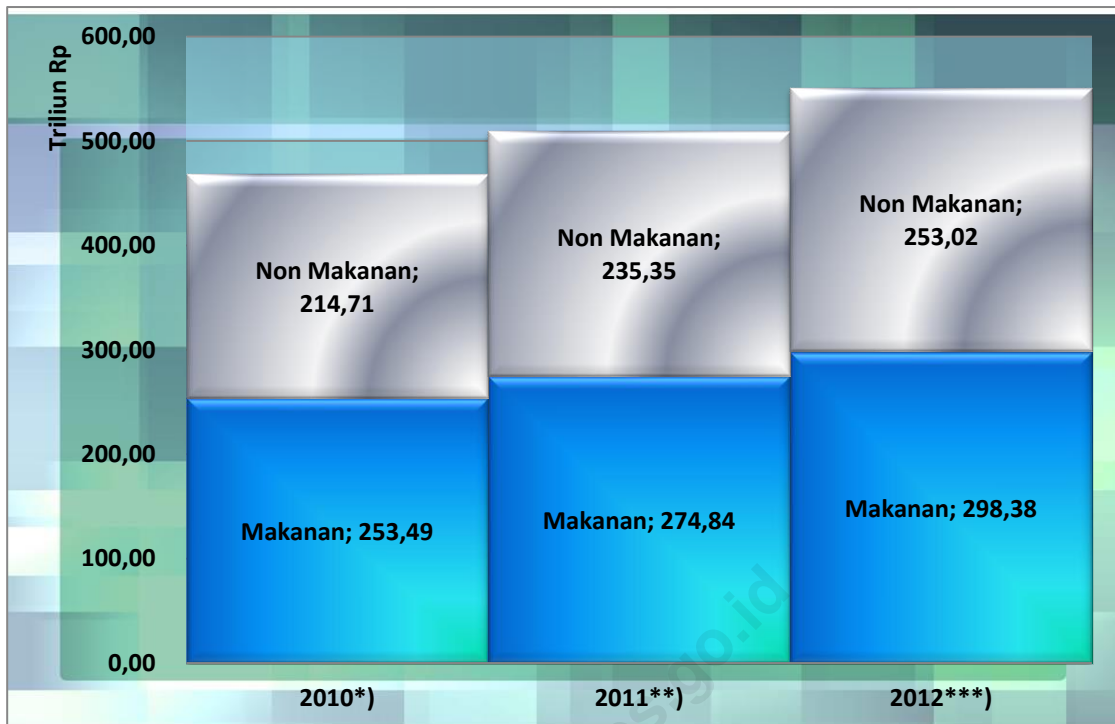


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

Secara nilai, baik konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan selama periode 2010-2012 terus meningkat. Pada tahun 2010, konsumsi makanan sebesar Rp.253,49 triliun meningkat menjadi Rp.274,84 triliun pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 sebesar Rp.298,38 triliun. Demikian halnya dengan konsumsi non makanan juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai konsumsi non makanan sebesar Rp.214,71 triliun, meningkat menjadi Rp.235,35 triliun pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 nilai konsumsi non makanan sebesar Rp.253,02 triliun.

Grafik 4. menggambarkan perkembangan KRT perkapita dan PDRB perkapita selama periode tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 KRT perkapita sebesar Rp. 10,87 juta, meningkat menjadi Rp. 11,64 juta pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 menjadi Rp.12,38 juta.

Grafik 4.
Nilai Konsumsi Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2012 (Rp triliun)

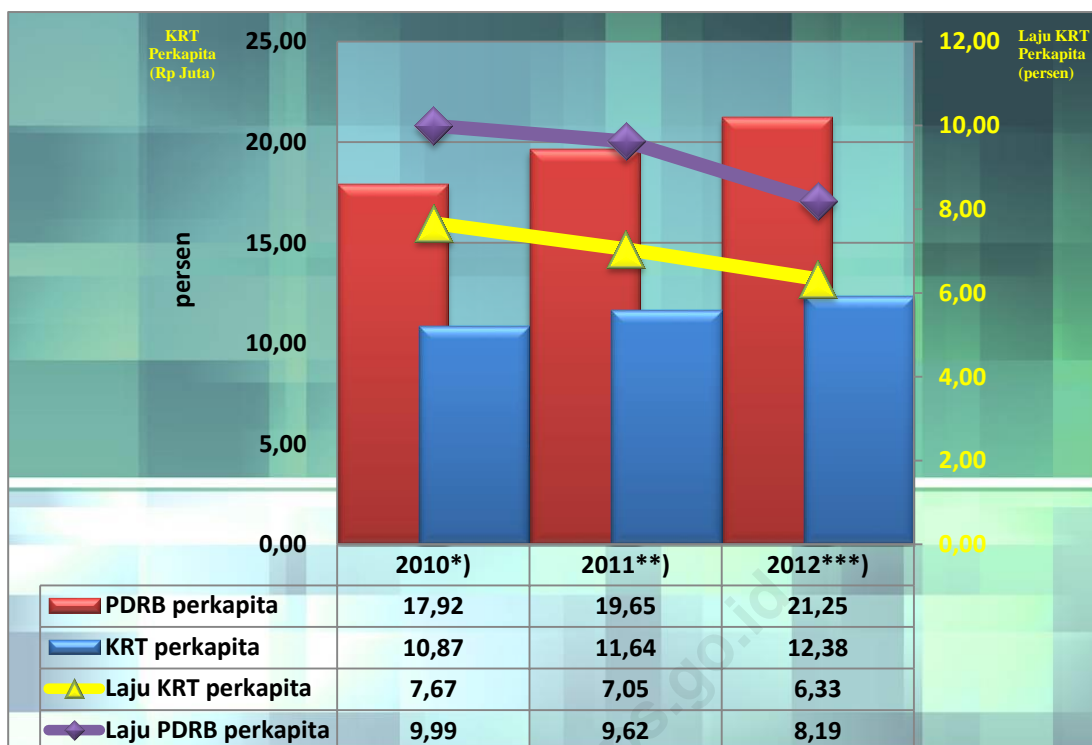


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya PDRB perkapita, pada tahun 2010 PDRB perkapita sebesar Rp.17,92 juta meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp.19,65 juta dan pada tahun 2012 menjadi Rp. 21,25 juta.

Perbandingan peningkatan KRT perkapita dan PDRB perkapita selama periode tahun 2010-2012, terlihat dari laju pertumbuhannya masing-masing seperti terlihat pada Grafik 5. Pada tahun 2010 terlihat bahwa laju pertumbuhan KRT perkapita sebesar 7,67 persen dan PDRB perkapita sebesar 9,99 persen.

Grafik 5.
KRT perkapita dan LPE perkapita serta Laju Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012

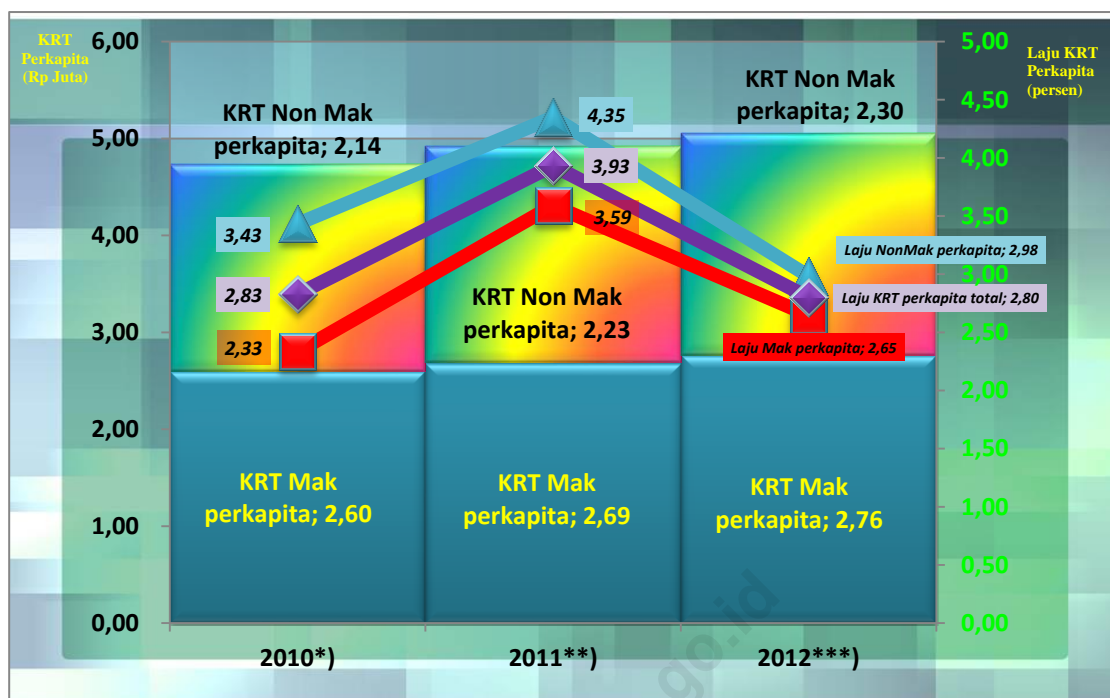


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

Pola laju pertumbuhan KRT perkapita dan PDRB perkapita hampir sama, artinya konsumsi rumah tangga mempunyai dorongan yang signifikan terhadap LPE. Laju pertumbuhan KRT perkapita dan PDRB perkapita cenderung terus melambat, pengaruh krisis ekonomi di Eropa berdampak pada perekonomian Jawa Barat.

Indikator riil meningkatnya KRT perkapita dengan menghilangkan faktor inflasi atau kenaikan harga adalah, KRT perkapita menurut harga konstan. Grafik berikut menggambarkan semakin meningkatnya KRT perkapita secara riil.

Grafik 6.
KRT perkapita atas dasar harga konstan (Rp Juta) dan laju pertumbuhannya (persen) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012

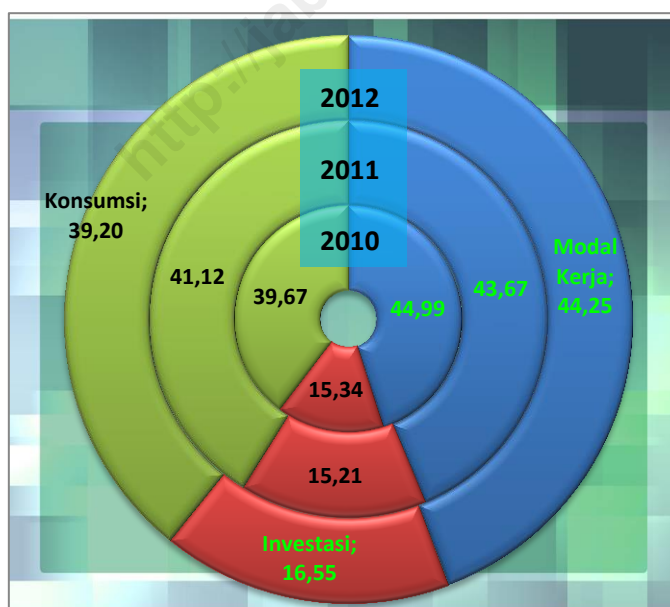


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2010 sebesar Rp. 4,74 juta, dengan rincian KRT Makanan perkapita sebesar Rp.2,6 juta dan KRT Non Makanan perkapita sebesar Rp.2,14 juta. Meningkat menjadi Rp. 4,92 juta pada tahun 2010 (Makanan Rp.2,69 juta dan Non Makanan Rp.2,23 juta) dan kembali meningkat pada tahun 2011 yang sebesar Rp.5,06 juta (Makanan Rp.2,76 juta dan Non Makanan Rp.2,30 juta). Laju pertumbuhannya pun mengalami kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 meningkat sebesar 2,83 persen (Makanan 2,33% dan Non Makanan 3,43%), kembali meningkat menjadi sebesar 3,93 persen (Makanan 3,59% dan Non Makanan 4,35%) pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 melambat menjadi sebesar 2,80 persen (Makanan 2,65% dan Non Makanan 2,98%). Perlambatan laju KRT perkapita pada tahun 2012 berkaitan erat dengan perlambatan tingkat pendapatan yang tercermin dari melambatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita.

Sumber pembiayaan konsumsi rumahtangga berasal dari pendapatan dan pinjaman, pembelian barang tahan lama seperti barang elektronik, gadget, kendaraan bermotor, furniture dapat menggunakan jasa pembiayaan dengan sangat mudah. Secara tidak langsung hal tersebut mendorong rumahtangga menjadi lebih konsumtif. Oleh karena itu terhitung sejak bulan Maret tahun 2012 pemerintah melalui Bank Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan uang muka kredit (*Loan to Value/LTV*) untuk kendaraan bermotor dan kredit pemilikan rumah (KPR). Kebijakan tersebut dilakukan untuk kehati-hatian dan penguatan pada sektor keuangan serta mencegah terjadinya *overheating* perekonomian. Akibatnya bagi konsumsi rumahtangga secara agregat adalah tertahannya pertumbuhan konsumsi non makanan, terindikasi dari semakin mengecilnya MPC KRT dan peranan konsumsi non makanan pada tahun 2012.

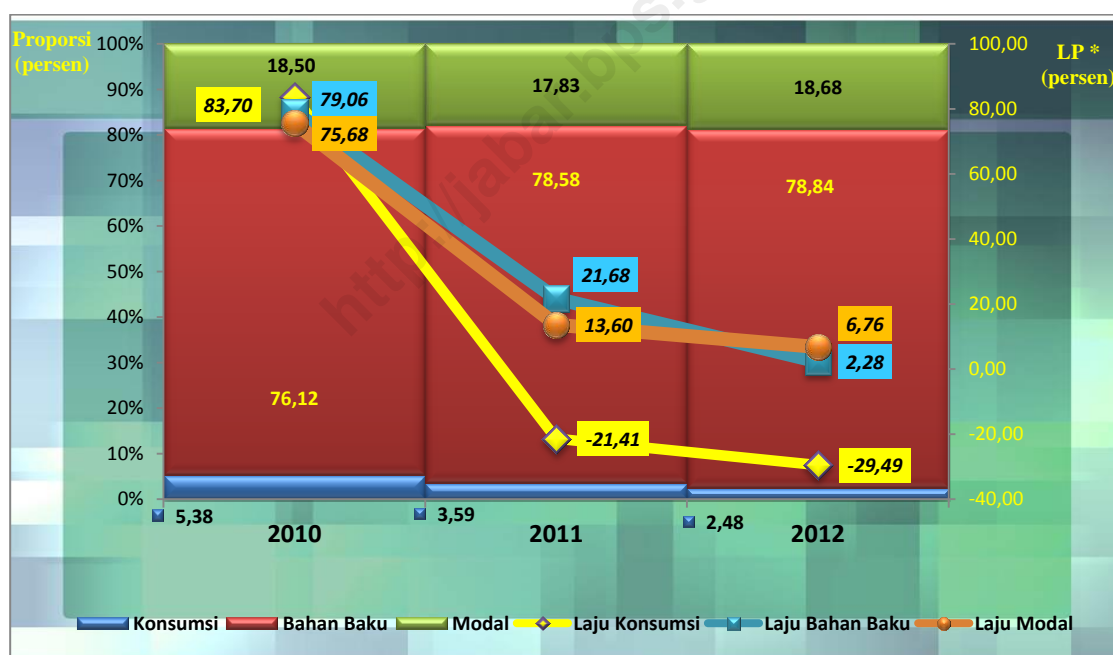
Grafik 7 .
Proporsi Pinjaman Yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis
Penggunaan Tahun 2010-2012 Di Provinsi Jawa Barat
(persen)



Sumber data : Bank Indonesia, 2012

Proporsi pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR selama periode 2010-2012 masih didominasi oleh kredit untuk Modal Kerja, kemudian pada peringkat kedua kredit untuk konsumsi dan yang terakhir adalah kredit investasi. Maraknya investasi dalam bentuk emas murni batangan ikut berpengaruh terhadap besarnya peranan kredit investasi. Beberapa bank umum dan syariah menyediakan produk investasi dengan cara yang cukup mudah. Proporsi kredit untuk modal kerja masih mendominasi selama periode 2010-2012, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Kredit untuk konsumsi selama periode tersebut, peranannya meningkat pada tahun 2011 sampai lebih dari 40 persen, dan pada tahun 2012 kembali dengan proporsi normal.

Grafik 8.
Proporsi Impor Komoditi Utama Menurut Klasifikasi BEC
Tahun 2010 – 2012 Di Provinsi Jawa Barat



Sumber data : Bank Indonesia, 2012

Ada kecenderungan masyarakat mengikuti pola konsumsi yang tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya sehingga memilih untuk melakukan pinjaman untuk memenuhi konsumsinya. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah dorongan konsumerisme dan kemudahan fasilitas dari

perusahaan pembiayaan. Didukung oleh jumlah penduduk yang besar, Jawa Barat menjadi potensi pasar yang cukup baik. Hal ini bisa dijadikan peluang yang baik bagi sektor usaha untuk lebih meningkatkan produksi untuk memenuhi tingginya permintaan. Idealnya secara ekonomi meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai sisi permintaan akan menyebabkan meningkatnya produksi atau sisi *supply*. Ini akan menjadi hal yang positif dengan catatan barang-barang yang dikonsumsi adalah barang produksi dalam region, bukan barang impor.

Grafik di atas menggambarkan data impor komoditi utama menurut klasifikasi kategori ekonomi (*BEC, Broad Economic Categories*). Impor barang konsumsi mempunyai proporsi yang paling sedikit jika dibandingkan dengan untuk bahan baku industri serta barang modal. Hanya sekitar 5,38 persen dari total impor luar negeri pada tahun 2010 kemudian menurun menjadi 3,59 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 kembali menurun persentasenya menjadi 2,48 persen. Jika melihat laju pertumbuhannya impor barang konsumsi pada tahun 2010 meningkat sangat tinggi sedangkan pada tahun 2011 laju pertumbuhannya menurun tajam mencapai lebih dari 20 persen. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 29 persen. Penurunan impor barang konsumsi merupakan hal yang positif bagi perekonomian domestik, barang konsumsi lebih banyak dipenuhi dari barang produk dalam negeri.

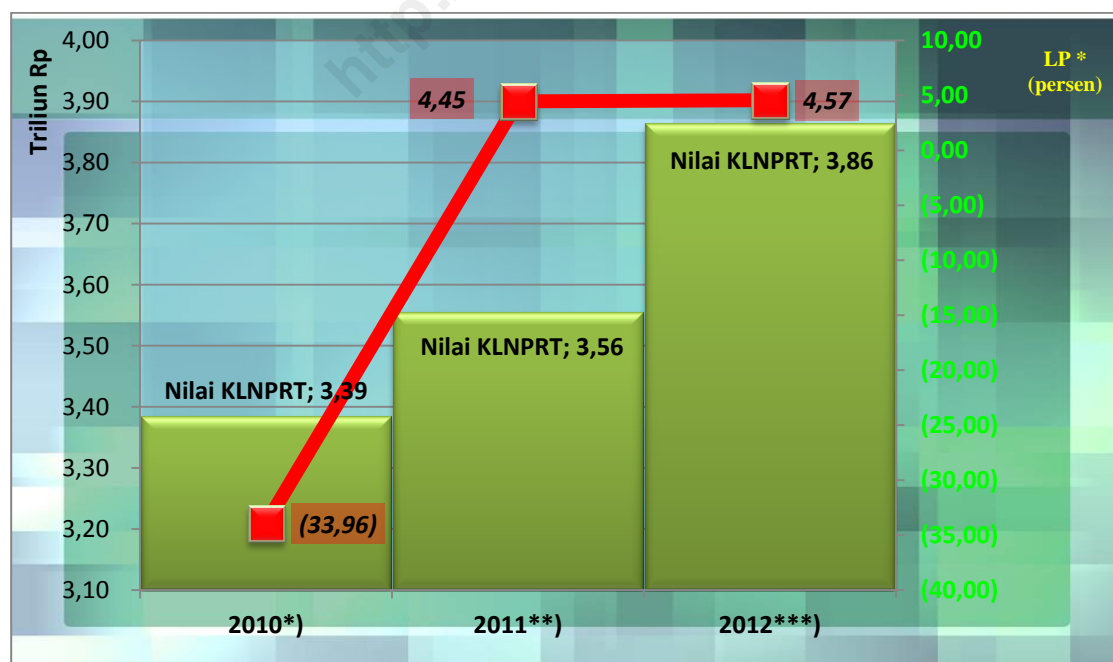
3.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT)

LNPRT merupakan satu entitas legal, yang secara prinsip terlibat dalam kegiatan layanan atau pemberian jasa kepada rumah tangga (*non-market*). Pengeluaran Konsumsi LNPRT mencakup berbagai pengeluaran oleh lembaga untuk pengadaan barang dan jasa, yang secara prinsip bertujuan untuk biaya operasional atau pengeluaran dalam melayani rumah tangga. Konsumsi

LNPRT memiliki besaran nilai yang tidak terlalu signifikan dalam perekonomian, akan tetapi perannya dalam mengawal kehidupan sosial dan politik masyarakat tidak dapat diabaikan. Bagi wilayah yang mengalami bencana alam LNPRT tampil sebagai garda terdepan, pada masa pemilu baik yang berskala regional maupun nasional LNPRT mengawal suksesnya pesta demokrasi. Nilai Konsumsi Lembaga Non Profit atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp 3,39 triliun, sedangkan pada tahun 2011 nilai konsumsi LNPRT sebesar Rp.3,56 triliun dan pada tahun 2012 hanya sedikit meningkat yaitu menjadi Rp.3,86 triliun.

Laju pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit pada tahun 2010 menurun tajam sebesar 33,96 persen, penurunan yang terjadi merupakan indikasi kembali normalnya pola konsumsi Lembaga Non Profit setelah pada tahun 2009 terjadi lonjakan terkait pemilihan umum dan pemilihan presiden. Selanjutnya pada tahun 2011 konsumsi LNPRT meningkat sebesar 4,45 persen dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 4,57 persen.

Grafik 9.
Nilai Konsumsi Lembaga Non Profit (Triliun Rp) dan Laju Pertumbuhan (persen) Tahun 2010-2012 Di Provinsi Jawa Barat



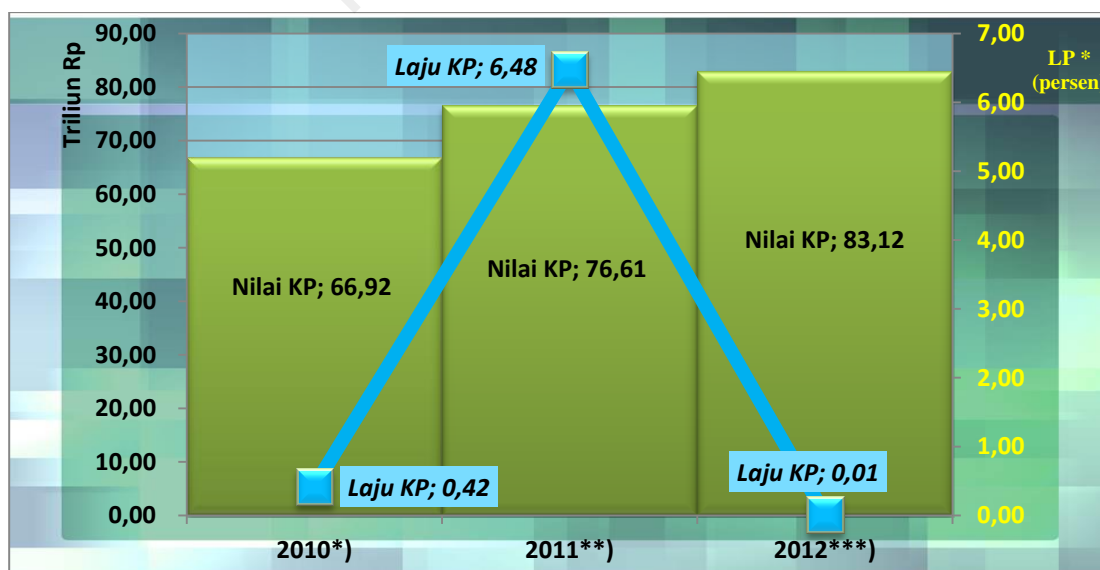
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Sebagai produsen, pemerintah menghasilkan jasa yang digunakan utk mengurus negara serta kebijaksanaan ekonomi dan sosial masyarakat/tdk untuk mencari untung. Selain sebagai produsen, pemerintah juga berperan dalam kegiatan konsumsi. Konsumsi pemerintah mencakup konsumsi kolektif dan individu yang dihitung sebagai konsumsi akhir pemerintah.

Konsumsi Pemerintah selama periode tiga tahun terakhir 2010-2012 mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebesar Rp 66,92 triliun menjadi Rp 76,61 triliun pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.83,12 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya belanja barang, belanja pegawai serta belanja modal. Laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah secara riil pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang sangat tipis yaitu sebesar 0,42 persen, kemudian meningkat tajam pada tahun 2011 sebesar 6,48 persen. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan konsumsi pemerintah melambat menjadi sebesar 0,01 persen.

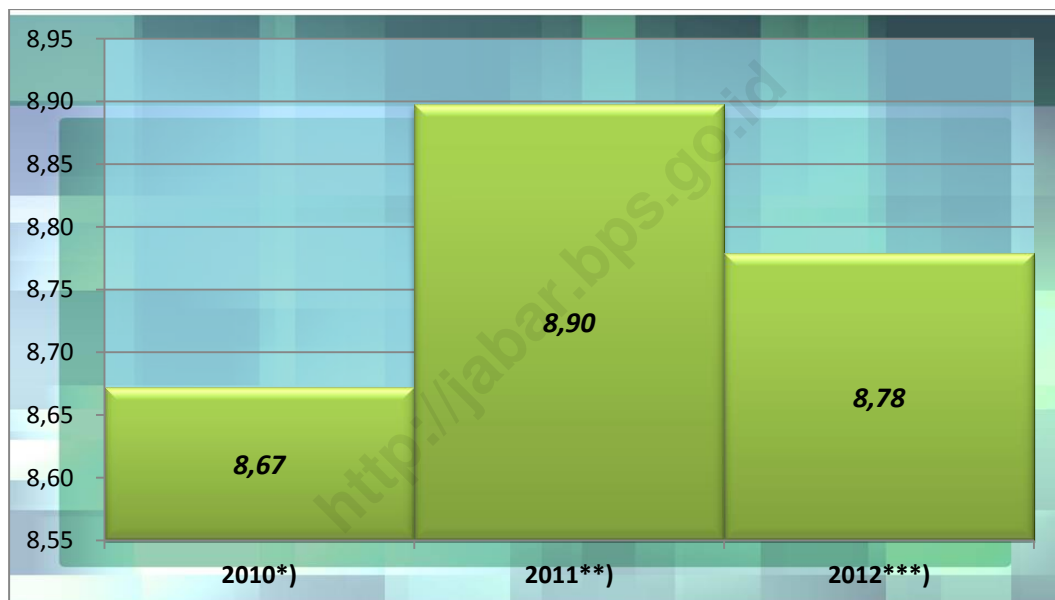
Grafik 10.
Nilai Konsumsi Pemerintah dan Laju Pertumbuhan
Tahun 2010 – 2012 Di Provinsi Jawa Barat



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

Peranan konsumsi pemerintah terus meningkat selama periode tahun 2010-2012. Pada tahun 2010 peranannya sebesar 8,67 persen dan pada tahun 2011 peranannya meningkat menjadi 8,9 persen. Pada tahun 2012 peranan konsumsi pemerintah sebesar 8,78 persen. Penguatan peranan konsumsi pemerintah pada tahun 2011 seiring dengan laju pertumbuhan yang cukup signifikan. Walaupun secara nilai selalu meningkat namun peranannya pada tahun 2012 lebih kecil daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 8,78 persen.

Grafik 11.
Peranan Konsumsi Pemerintah
Tahun 2010 – 2012 Di Provinsi Jawa Barat



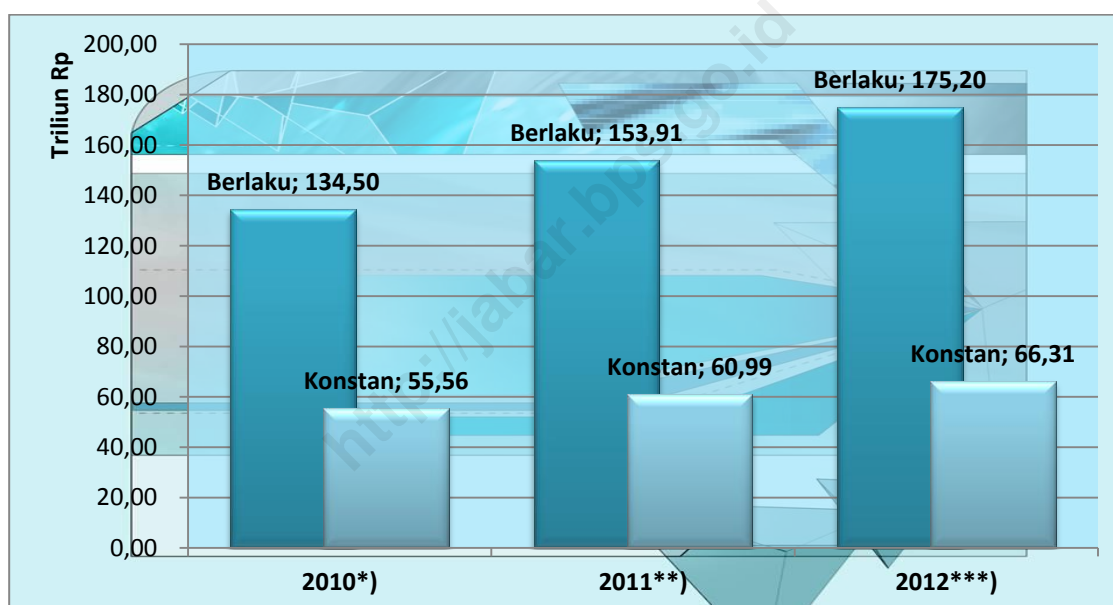
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

3.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Nilai investasi fisik yang tanamkan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dan masih terkandung nilai penyusutan disebut sebagai PMTB. Pelaku pembentukan modal terdiri dari pemerintah, swasta dan rumah tangga, serta BUMN/BUMD yang bergerak pada seluruh sektor lapangan usaha. Atau dengan kata lain PMTB adalah selisih dari capital tahun sebelumnya dengan capital pada tahun berjalan. Adapun kapital diartikan sebagai berbagai bentuk barang modal

seperti bangunan, mesin dan perlengkapannya, sarana atau alat transportasi, serta barang modal lainnya yang memberikan kontribusi terhadap kelangsungan suatu proses produksi. Menurut *System of National Accounts* (SNA), PMTB identik dengan besarnya investasi fisik (*real investment*) yang direalisasikan di suatu negara atau wilayah pada suatu waktu tertentu (*physical domestic investment*). PMTB disebut sebagai *bruto* karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya.

Grafik 12.
PMTB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku dan
Konstan Tahun 2010– 2012 (triliun rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Secara nominal, besaran PMTB selama periode tahun 2010-2012 terus mengalami peningkatan dari Rp. 134,5 triliun pada tahun 2010, naik menjadi Rp. 153,91 triliun tahun 2011, dan kemudian meningkat secara signifikan menjadi Rp. 175,2 triliun pada tahun 2012. Demikian pula halnya apabila dilihat secara riil (tanpa pengaruh inflasi), maka komponen PMTB terus mengalami peningkatan

selama periode tiga tahun terakhir yaitu dari Rp. 55,56 triliun pada tahun 2010, Rp. 60,99 triliun tahun 2011, dan menjadi Rp. 66,31 triliun pada tahun 2012.

Apabila ditinjau dari sisi kontribusinya, maka komponen PMTB selama periode 2010-2012 mempunyai peranan yang semakin meningkat terhadap total PDRB, yaitu dari 17,43 persen pada tahun 2010, menjadi 17,43 persen tahun 2011, dan kemudian meningkat kembali menjadi 18,50 persen pada tahun 2012. Data tersebut menunjukkan bahwa komponen PMTB mempunyai peranan yang cukup besar dalam struktur perekonomian di Jawa Barat.

Tabel 2.
PDRB adh Berlaku, PMTB, Persentase PMTB terhadap Total PDRB
dan *Source of Growth* PMTB di Jawa Barat
Tahun 2010-2012

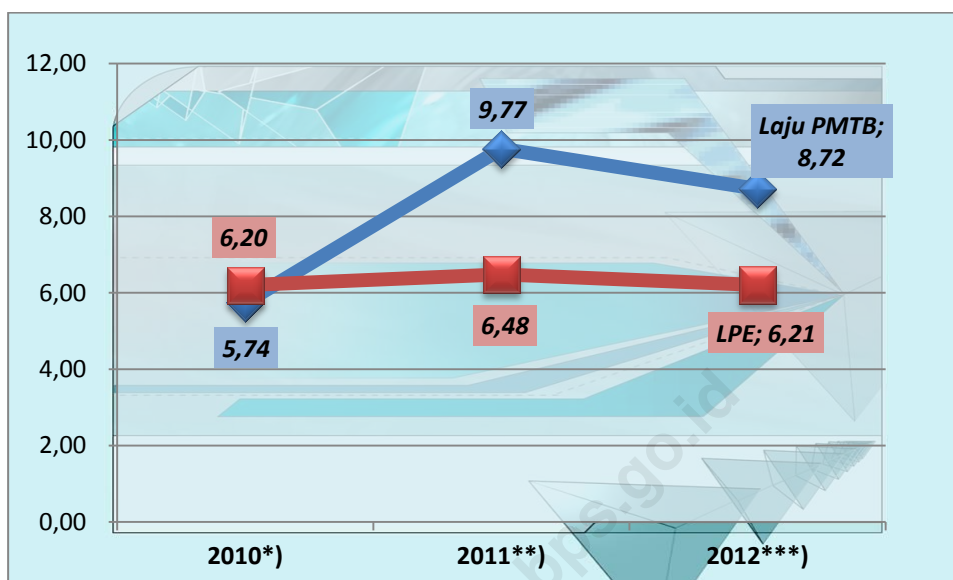
Uraian	Tahun		
	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PDRB adh Berlaku (Triliun rupiah)	771,59	860,98	946,86
2. PMTB (Triliun rupiah)	134,50	153,90	175,20
Persentase PMTB terhadap total PDRB (persen)	17,43	17,88	18,50

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian secara makro, tampak pola pertumbuhan yang sejalan antara laju komponen PMTB dengan LPE pada periode 2010-2012. Setelah mengalami peningkatan kinerja di tahun 2011, yakni dari 5,74 persen tahun 2010 menjadi sebesar 9,77 persen, ditahun 2012 kinerja komponen ini sedikit mengalami perlambatan, yaitu menjadi sebesar 8,72 persen. Demikian pula dengan LPE, peningkatan juga terjadi di tahun 2011, yaitu dari

6,20 persen pada tahun 2010 menjadi 6,48 persen. Sejalan dengan komponen PMTB, kinerja ekonomi makro Jawa Barat mengalami sedikit perlambatan di tahun 2012 dengan LPE yang menjadi sebesar 6,21 persen.

Grafik 13.
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PMTB
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2012 (Persen)

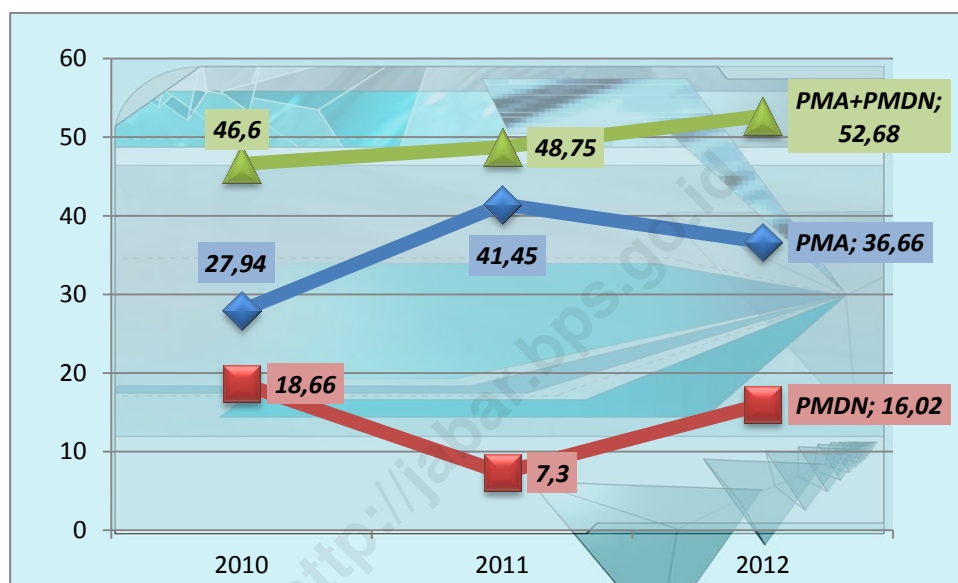


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Menurut asal investor, investasi yang tercatat pada BKPMDB dibedakan dalam dua jenis, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi dalam hal ini tidak hanya investasi fisik, tetapi juga mencakup aset lancar dan pembelian tanah yang secara konsep tidak termasuk dalam PMTB pada publikasi ini. Sehingga perlu kehati-hatian dalam membandingkannya dengan komponen PMTB pada PDRB menurut Penggunaan. Secara umum, total nilai realisasi investasi swasta melalui PMA dan PMDN selama periode Tahun 2010-2012 menunjukkan peningkatan. Nilai realisasi PMA meningkat dari Rp. 27,94 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 41,45 triliun pada tahun 2011, namun mengalami penurunan menjadi Rp. 36,66 triliun di tahun 2012. Sementara itu, PMDN berfluktuasi dari Rp. 18,66 triliun tahun 2010 menurun signifikan menjadi Rp. 7,3 triliun tahun 2011, dan meningkat menjadi Rp.

16,02 triliun pada tahun 2012. Secara proporsi, realisasi PMA selalu lebih tinggi daripada PMDN. Hal tersebut menggambarkan bahwa iklim usaha di Jawa Barat masih menarik bagi para investor asing. Berbagai promosi, kebijakan serta banyak kemudahan dalam hal regulasi dan perijinan diterapkan oleh pemerintah guna terus menarik minat investor asing.

Grafik 14.
Nilai Realisasi PMA dan PMDN
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Triliun Rp)

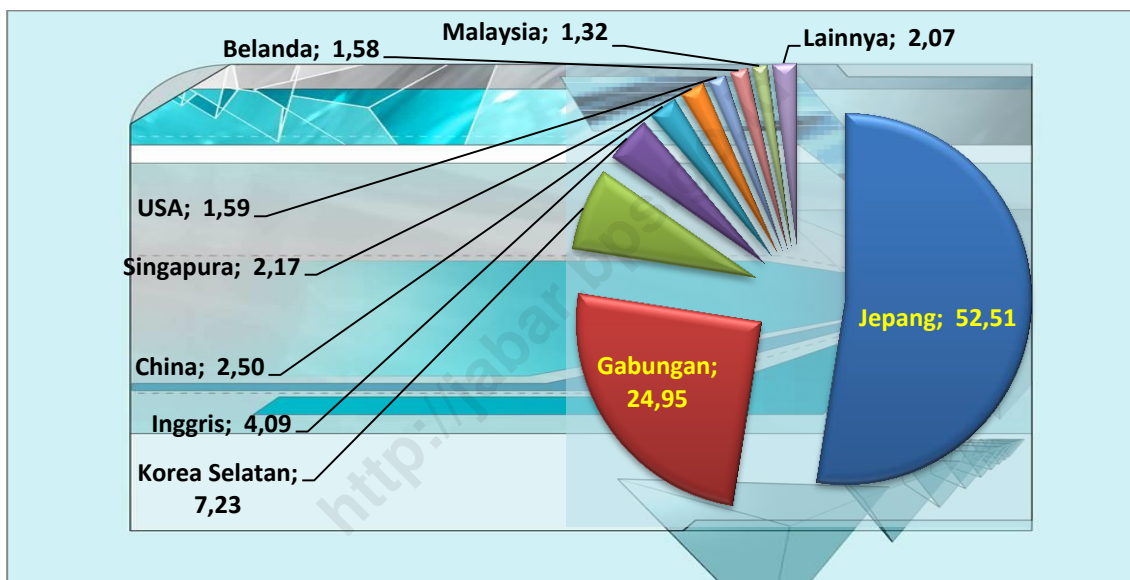


Sumber: BKPPMD Provinsi Jawa Barat, 2012

Grafik 15 menggambarkan struktur Investor berdasarkan negara asal. Investor dari Jepang mendominasi dengan porsi yang mencapai 52,51 persen. Perusahaan berbendera Jepang di Jawa Barat merajai industri alat angkutan, baik beroda dua maupun beroda empat, demikian halnya untuk industri barang elektronik. Walaupun hanya sebagai assembly atau perakitan, di masa mendatang diharapkan dapat membantu proses inisiasi industri alat angkutan produk nasional dengan seratus persen sumber daya dalam negeri. Dengan demikian surplus usaha yang diperoleh dapat dinikmati dalam wilayah dalam negeri khususnya Jawa Barat.

Selanjutnya Investor dari negara Korea Selatan juga mengambil porsi yang cukup besar, yaitu 7,23 persen. Dengan sifat yang terkenal dengan ketangguhan dan kecepatan yang luar biasa, investor dari Korea Selatan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Kemudian investor dari Inggris yang tercatat mengambil porsi sebesar 4,09 persen, selebihnya adalah investor dari China, Singapura, USA, Belanda, Malaysia dengan porsi kurang dari tiga persen.

Grafik 15.
Persentase Nilai Investasi PMA di Jawa Barat
Menurut Negara Asal Tahun 2012



Sumber: BKPPMD Provinsi Jawa Barat (diolah)

Dengan banyaknya investor dari berbagai negara diharapkan tidak hanya didasarkan oleh motif ekonomi semata, tetapi dapat menjadi stimulus bagi perekonomian di sekitar wilayah lokasi industri. Tentunya disertai dengan analisis dampak lingkungan yang terpantau dengan baik oleh berbagai pihak, terutama pemerintah sebagai regulator. Di samping itu, budaya kerja yang inovatif dan kompetitif dapat menjadikan inspirasi bagi bangsa Indonesia khususnya Jawa Barat.

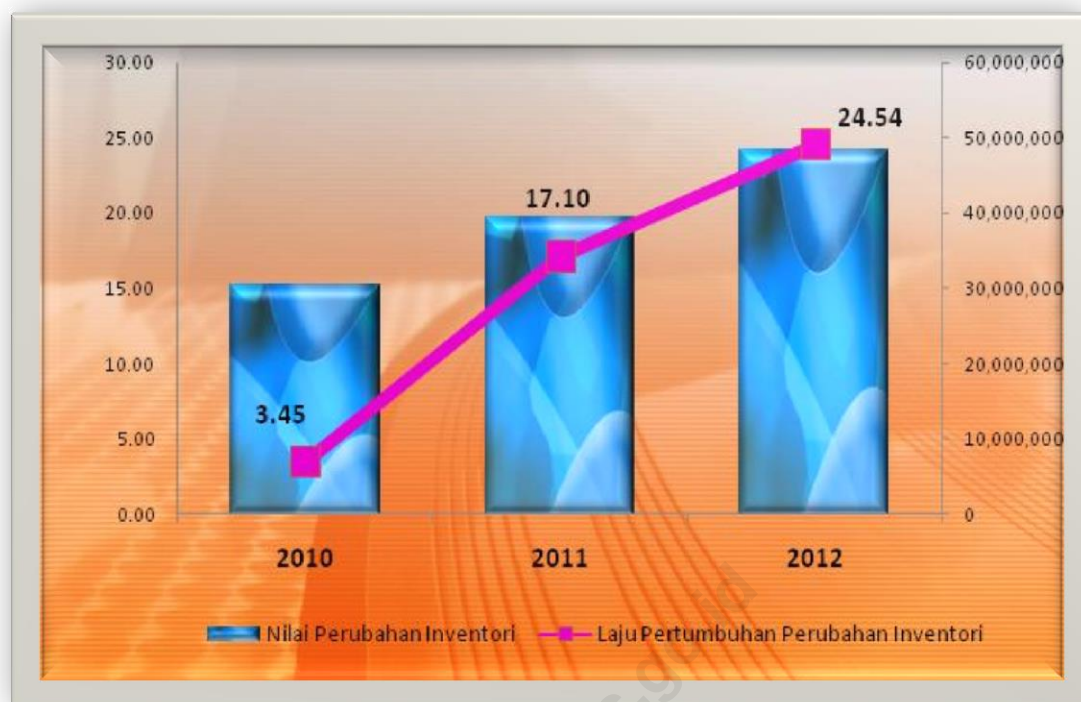
3.5. Perubahan Inventori

Investasi memiliki peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama investasi fisik yang dapat berpengaruh langsung untuk menggerakkan sektor *real*. Keberlangsungan proses produksi bergantung kepada inventori atau persediaan yang akan bertransformasi menjadi suatu produk lain, selain itu proses produksi juga membutuhkan barang modal serta tenaga kerja. Keberadaan komponen inventori memerlukan kontinuitas untuk menjamin proses produksi dapat berlangsung terus. Upaya menjamin kontinuitas inventori dalam suatu rentang waktu dapat dilakukan dengan mengamati perubahan inventori antar periode. Perubahan inventori dapat dijadikan indikator peningkatan atau penurunan produksi pada periode selanjutnya, hal ini bergantung dari siklus produksi masing-masing barang.

Kedudukan perubahan inventori dalam perekonomian merupakan bagian dari investasi fisik. Secara konsep inventori merupakan berbagai barang yang dikuasai produsen yang akan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku atau bahan penolong yang akan memiliki nilai ekonomi dan guna yang lebih tinggi, termasuk didalamnya persediaan barang yang masih dalam pengerjaan serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori pada Tahun 2012 telah mencapai Rp 48,4 triliun bandingkan dengan keadaan lima tahun sebelumnya (2007) yang masih sebesar Rp 18,26 triliun atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 165,44 persen. Selama periode tiga tahun terakhir (2010-2012) terjadi peningkatan perubahan inventori secara berturut-turut dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 24,54 persen seperti terlihat pada Grafik 16.

Grafik 16.
Nilai Perubahan Inventori dan Laju Pertumbuhan Perubahan Inventori
Jawa Barat Tahun 2010-2012



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Kontribusi komponen perubahan inventori terhadap perekonomian selama 2010-2012 tercatat mengalami kenaikan secara berturut-turut pada tahun 2010 sebesar 3,93 persen, dua tahun kemudian kontribusi perubahan inventori mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,12 persen. Peningkatan kontribusi perubahan inventory dalam perekonomian ini secara makro merupakan indikasi positif bagi peningkatan produksi.

Fenomena perkembangan perubahan inventori di Jawa Barat pada periode 2010-2012 tampak sejalan dengan pertumbuhan impor bahan baku pada periode yang sama, dimana terus mengalami pertumbuhan positif dan peningkatan porsi dibandingkan dengan impor barang untuk keperluan konsumsi dan barang modal seperti yang terlihat pada Grafik 8 yang telah dibahas sebelumnya.

Grafik 17.
Peranan Perubahan Inventori Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2010-2012



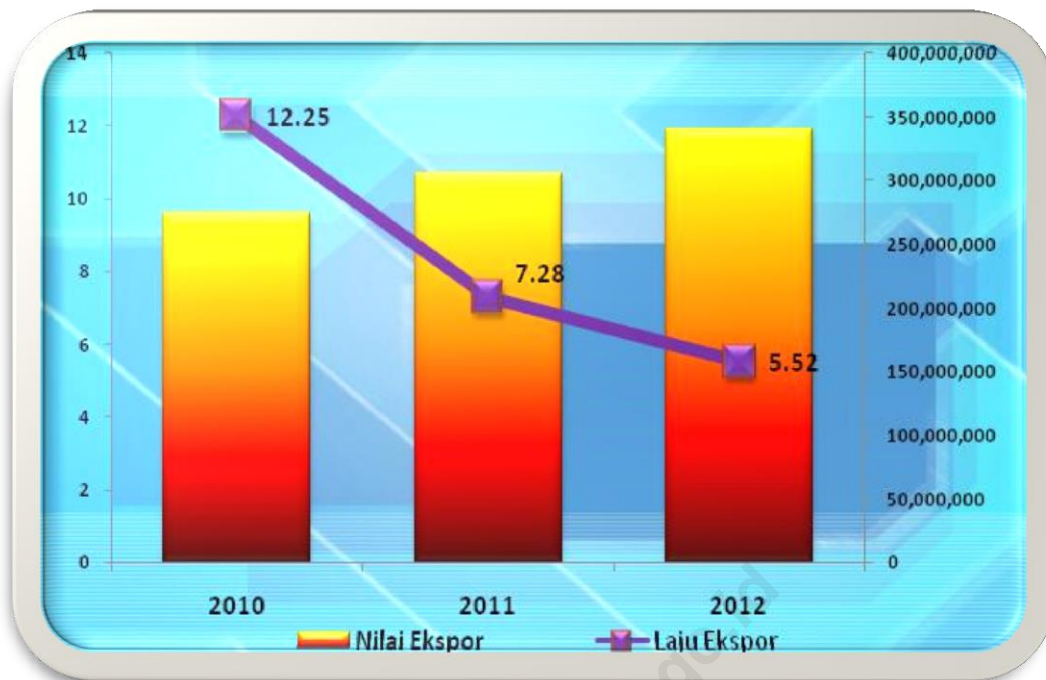
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

3.4. Ekspor dan Impor

3.4.1. Ekspor

Dampak krisis zona eropa yang terjadi pada tahun 2011 juga terasa di Indonesia walaupun tidak sebesar tahun 2008. Perlambatan ekonomi di beberapa negara yang merupakan tujuan ekspor Jawa Barat, memberikan konsekuensi pengetatan belanja barang dan jasa dari negara-negara tersebut sehingga menurunkan aktivitas perdagangan antar negara. Hal ini memukul permintaan ekspor nasional khususnya Jawa Barat sehingga nilai ekspor terus menerus mengalami perlambatan. Tercatat nilai ekspor selama tahun 2012 sebesar Rp 340.28 triliun, atau tumbuh sebesar 5,52 persen dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, pertumbuhan ekspor tersebut tampak mengalami perlambatan cukup signifikan, dimana pertumbuhan kuantitas ekspor pada tahun 2010 dan 2011 masing masing sebesar 12,25 persen dan 7,28 persen.

Grafik 18.
Nilai Ekspor (Juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekspor (Persen) Jawa Barat Tahun 2010-2012



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

Komponen ekspor barang dan jasa dalam PDRB menurut pengeluaran terdiri dari : 1) ekspor antar negara, 2) ekspor antar provinsi dan 3) ekspor jasa. Selama Tahun 2010 - 2012 kontribusi ekspor antar negara adalah yang terbesar yaitu diatas 26 persen disusul oleh ekspor antar provinsi dan yang terkecil adalah kontribusi ekspor jasa. Sementara itu kontribusi ekspor antar negara di Jawa Barat selama tiga tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan yang semakin mengecil, hal ini karena permintaan ekspor yang mengalami tekanan akibat krisis. Berlawanan dengan kondisi ekspor antar negara, kontribusi ekspor antar provinsi selama periode 2010-2012 terus-menerus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan preseden yang baik bagi perkembangan perdagangan domestik Jawa Barat.

Grafik 19.
Peranan Komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Jawa Barat
Tahun 2010-2012 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

Kontribusi komponen ekspor barang dan jasa terhadap perekonomian dalam kurun 2009 - 2012 berada pada kisaran 35 persen seperti terlihat pada Tabel 3, posisi ini anjlok dari periode sebelum tahun 2008 dengan posisi masih pada kisaran 40 persen, seperti telah dikemukakan bahwa krisis financial tahun 2008 menjadi penyebab utama penurunan kontribusi ekspor.

Lesunya perdagangan antar negara menjadi peluang bagi peningkatan perdagangan domestik, selain itu untuk memanfaatkan momentum permintaan domestik yang sangat potensial. Hal ini dapat diamati dalam kontribusi ekspor antar provinsi yang berangsur mengalami peningkatan menjadi 7,99 persen pada tahun 2012 dibandingkan pada dua tahun sebelumnya masih sebesar 6,18 persen.

Tabel 3.
Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2010-2012

Komponen	Peranan (%)			Laju Pertumbuhan (%)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Ekspor	35.55	35.46	35.94	12.25	7.28	5.52
Impor	28.33	29.00	28.62	8.71	11.65	3.42
Ekspor Netto	7.22	6.46	7.32	21.74	-3.19	11.32

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2012

Sementara itu, kinerja ekspor netto mengalami peningkatan di tahun 2010 sebesar 21,74 persen, hal ini mengandung makna bahwa surplus perdagangan di Jawa Barat mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2009. Keadaan ini tidak berlangsung pada tahun berikutnya (2011) karena ekspor netto kemudian mengalami penurunan bersamaan dengan krisis zona eropa yang mulai terasa di Jawa Barat, dimana ekspor netto tercatat mengalami penurunan sebesar 3,19 persen.

Sejalan dengan pertumbuhan negatif ekspor netto pada tahun 2011, kontribusi komponen ini terhadap perekonomian Jawa Barat mengalami penurunan menjadi 6,46 persen, bandingkan dengan keadaan tahun 2010 yang masih berada pada posisi 7,22 persen.

Kendati demikian, di tahun 2012 kinerja ekspor netto kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 11,32 persen, namun peningkatan komponen bukan dipicu oleh peningkatan ekspor, tapi lebih disebabkan karena melambatnya pertumbuhan impor di Jawa Barat pada tahun tersebut.

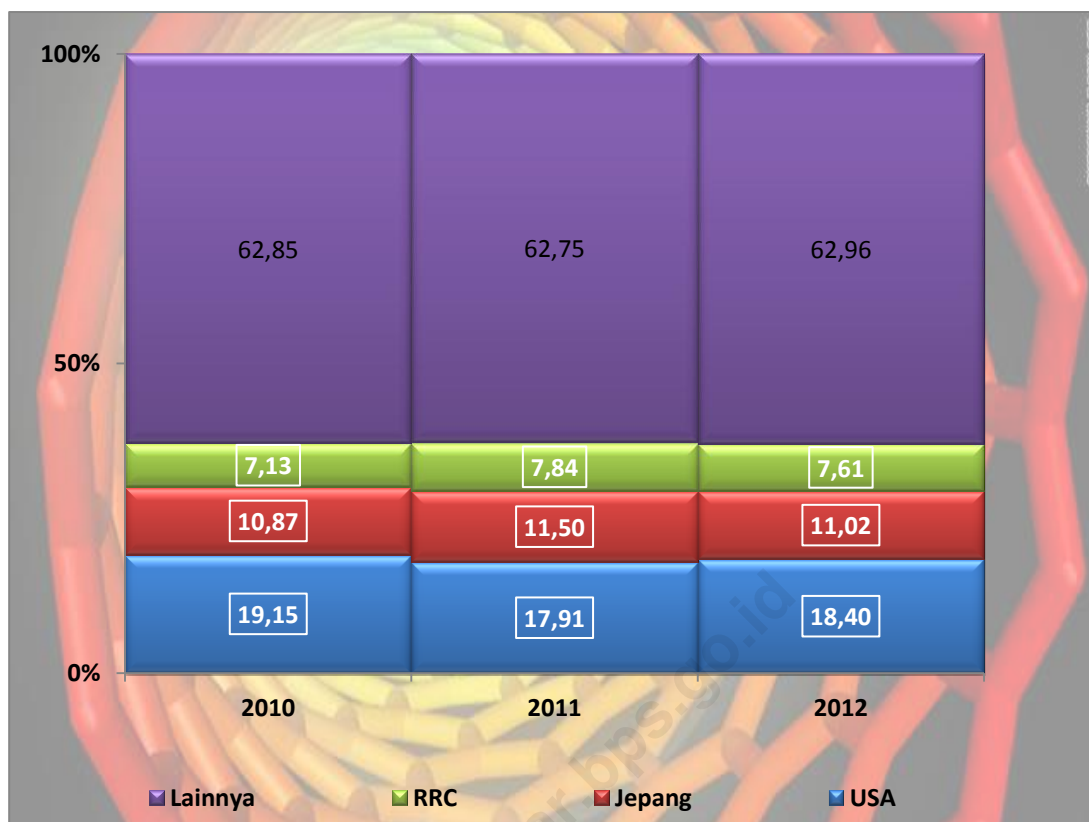
Grafik 20.
Peranan Komoditas Ekspor Non Migas Utama Jawa Barat
Tahun 2010-2012 (Persen)



Sumber : Bank Indonesia, 2012

Komoditas ekspor utama Jawa Barat ditinjau dari peranannya terhadap nilai ekspor secara keseluruhan terdiri dari : 1) Alat Telekomunikasi, 2) Pakaian, 3) Benang Tenun, Kain tekstil dan hasil-hasilnya 3) Pakaian dan 4) Mesin Listrik, Aparat dan alat-alatnya seperti terlihat pada Grafik 20. Komposisi empat komoditas utama ekspor ini bertahan selama tahun 2010-2012, meski demikian seiring dengan melambatnya permintaan ekspor di tahun 2012 terlihat bahwa kecuali komoditas mesin listrik, aparat dan alat-alatnya, peranan ketiga komoditas ekspor utama lainnya di tahun tersebut mengalami penurunan. Tercatat komoditas alat telekomunikasi selama tahun 2011 - 2012 terus-menerus mengalami penurunan kontribusi terhadap nilai total ekspor.

Grafik 21.
Tiga Besar Negara Tujuan Ekspor Non Migas Jawa Barat Tahun 2010-2012
(Persen)



Sumber : Bank Indonesia, 2012

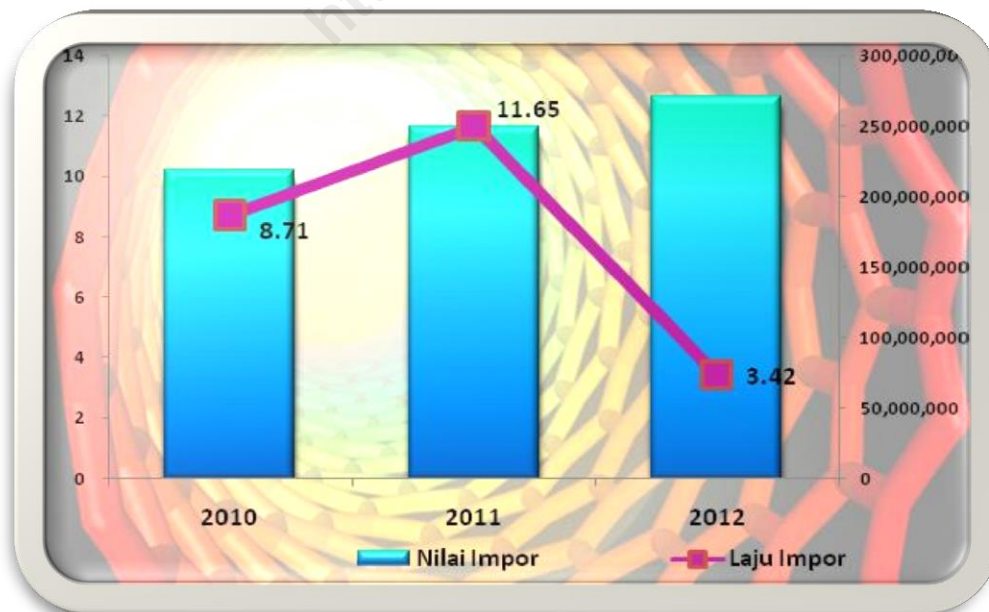
Tiga besar negara tujuan ekspor komoditas non migas Jawa Barat selama tahun 2010-2012 yaitu : 1) Amerika Serikat, meski kontribusi ekspor ke negara ini pada tahun 2011 mengecil menjadi sebesar 17,91 persen apabila dibandingkan dengan posisi di tahun 2010 sebesar 19,15 persen. Kondisi permintaan komoditas ekspor dari Amerika Serikat di tahun 2011-2012 melemah karena krisis financial yang memukul perekonomian di negara tersebut, meski demikian pada tahun 2012 kontribusi ekspor kembali merangkak menjadi sebesar 18,40 persen, 2) Jepang pada posisi kedua sebagai negara tujuan ekspor Jawa Barat, meski terimbas krisis financial global dan dilanda bencana alam gempa serta tsunami yang hebat akan tetapi kontribusi ekspor dari negara ini relatif tidak berkurang, hal ini terbukti dengan kontribusi ekspor pada tahun 2011 yang meningkat sebesar

11,50 persen dibandingkan dengan kondisi di tahun 2010 sebesar 10,87 persen, 3) RRC di tempat ketiga sebagai negara tujuan ekspor non migas utama Jawa Barat dengan kontribusi selama 2010-2012 meningkat sedikit dari posisi tahun 2010, meski demikian masih pada kisaran 7 persen seperti yang terlihat pada Grafik 21.

3.4.2. Impor

Pengendalian impor memerlukan komitmen dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Kebijakan impor akan menuai kontroversi ketika dilaksanakan tanpa perangkat yang mendukung berupa sanksi tegas serta aspek legal yang jelas bagi pelanggaran aturan impor. Tidak hanya itu, kebijakan pengendalian impor memerlukan koordinasi dan *rule of the game* yang jelas meliputi seluruh aspek dari hulu ke hilir yaitu kecukupan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jaringan distribusi, sarana dan prasarana pendukung, stok yang memadai di pasar serta perdagangan produk.

Grafik 22.
Nilai Impor (Juta Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Impor (Persen) Jawa Barat Tahun 2010-2012

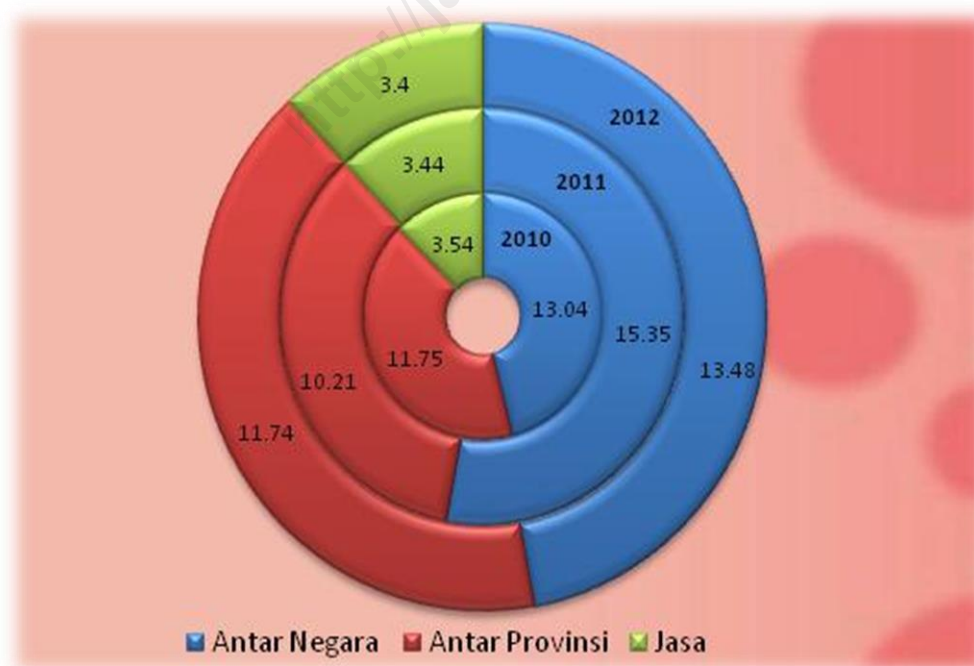


Sumber : BPS Jawa Barat, 2012

Apabila dicermati pada kurun 2010-2012 maka laju impor menunjukkan pertumbuhan positif meskipun melambat pada tahun 2012 sebesar 3,42 persen, setelah meningkat signifikan pada tahun 2011 sebesar 11,65 persen, tercatat nilai total impor Jawa Barat pada tahun 2012 telah mencapai Rp 270,95 triliun. Hal ini berkaitan erat dengan melemahnya perekonomian dari negara pengekspor akibat krisis, sehingga berimbas pada produksi yang turut melambat.

Berkaitan dengan melemahnya kuantitas impor tersebut, secara kumulatif terjadi perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan di Jawa Barat pada tahun 2012. dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara *import contain* dari bahan baku yang digunakan untuk produksi masih tinggi. Hal ini tergambar dari porsi impor bahan baku yang terus menerus mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2012 sebesar 78,84 persen.

Grafik 23.
Peranan Komponen Impor Barang dan Jasa terhadap PDRB Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)



Sumber : BPS Jawa Barat, 2012

Sementara ditinjau dari komposisi komponen impor dalam PDRB Menurut Pengeluaran, impor antar negara memiliki porsi terbesar dalam kurun 2010-2012 disusul oleh impor antar provinsi dan impor jasa seperti yang terlihat dalam Grafik 23.

Komoditas impor utama Jawa Barat ditinjau dari peranannya terhadap nilai impor secara keseluruhan selama kurun 2010-2012 terdiri dari 1) Mesin, Listrik, Aparat dan Alat-alatnya 2) Barang Tenun, Kain Tekstil dan hasilnya 3) Alat Telekomunikasi dan 4) Mesin Industri Tertentu/Khusus. Komoditas impor yang mengalami peningkatan peranan pada Tahun 2012 adalah 1) Mesin, Listrik, Aparat dan Alat-alatnya dan 2) Mesin Industri Tertentu/Khusus. Sementara peranan impor alat telekomunikasi selama kurun tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan.

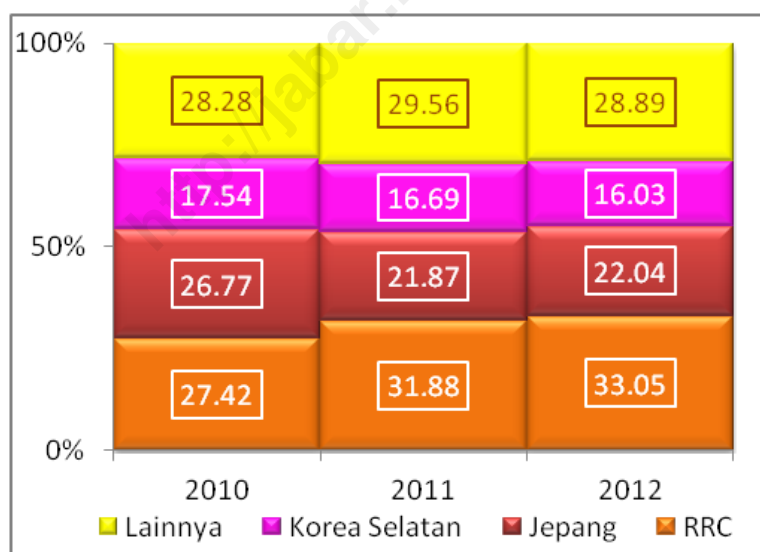
Grafik 24.
Peranan Komoditas Impor Non Migas Utama Jawa Barat
Tahun 2010-2012



Sumber : BPS Jawa Barat, 2012

Apabila ditinjau dari negara asal impor Jawa Barat selama 2010-2012, maka kontribusi tiga terbesar negara pengimpor komoditas non migas Jawa Barat berasal dari : 1) RRC dengan porsi yang terus membesar selama periode tersebut, tercatat pada tahun 2012 mencapai 33,05 persen, 2) Jepang dimana selama periode 2011-2012 mengalami penurunan kontribusi impor dibandingkan tahun 2010, hal ini salah satunya diakibatkan bencana gempa dan tsunami yang meluluhlantakan negeri sakura ini pada tahun 2011, sehingga berakibat langsung terhadap kondisi perekonomiannya dan 3) Korea Selatan ditempat ketiga dengan kontribusi yang semakin mengecil selama periode 2010-2012, meski demikian masih berkisar pada lebih dari 16 persen pada tahun 2011-2012 dibandingkan dengan posisi pada tahun 2010 sebesar 17,54 persen.

Grafik 25.
Tiga Besar Negara Asal Impor Non Migas Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)



Sumber : Bank Indonesia, 2012

3.7. Sumber Laju Pertumbuhan (*Source of Growth/SOG*)

Sumber laju pertumbuhan (SOG) menggambarkan sumbangan masing-masing komponen PDRB terhadap total laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Pada tahun 2012 seluruh komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non pemerintah, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor, memberikan peranan positif bagi LPE di Jawa Barat.

Konsumsi rumah tangga dalam kurun tiga tahun terakhir (2010-2012) memberikan andil positif dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sejalan dengan kontribusi komponen ini yang memiliki porsi terbesar dalam PDRB. Sumbangan komponen konsumsi rumah tangga tahun 2012 sebesar 2,83 persen mengecil dibandingkan tahun 2011 yang memberikan andil sebesar 3,67 persen.

Sumbangan negatif sebesar 0,30 persen diberikan oleh komponen konsumsi lembaga non profit terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010. Walaupun demikian, tahun 2011 sumbangan positif diberikan komponen ini sebesar 0,02 persen, berlanjut pada tahun 2012 dengan besaran yang sama. Hal ini sejalan dengan peranan komponen konsumsi lembaga non profit pada tahun 2011-2012 yang cenderung tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 0,41 persen.

Selama kurun dua tahun (2010-2011), andil konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan nilai positif. Pada tahun 2010, komponen ini memberikan andil positif sebesar 0,03 persen, kemudian meningkat pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,38 persen. Pada tahun 2012 komponen ini cenderung tidak memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2012

Uraian	2010*)	2011**)	2012***)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.93	3.67	2.83
2. Konsumsi Lembaga	-0.30	0.02	0.02
3. Konsumsi Pemerintah	0.03	0.38	0.00
4. PMTB	0.99	1.68	1.55
5. Perubahan Stok	0.12	0.58	0.91
6. Ekspor	5.15	3.24	2.47
7. Impor	2.67	3.65	1.12
Jumlah	6.20	6.48	6.21

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Komponen PMTB memberikan sumbangan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi selama periode tiga tahun (2010-2012). Peningkatan ini merupakan perkembangan yang positif bagi perekonomian Jawa Barat dimana menunjukkan peranan investasi fisik yang semakin besar dalam perekonomian di Jawa Barat untuk menggerakkan sektor riil. Tercatat pada tahun 2012 komponen ini memberikan andil sebesar 1,55 persen, sedangkan andil pada tahun 2011 tercatat sebesar 1,68 persen.

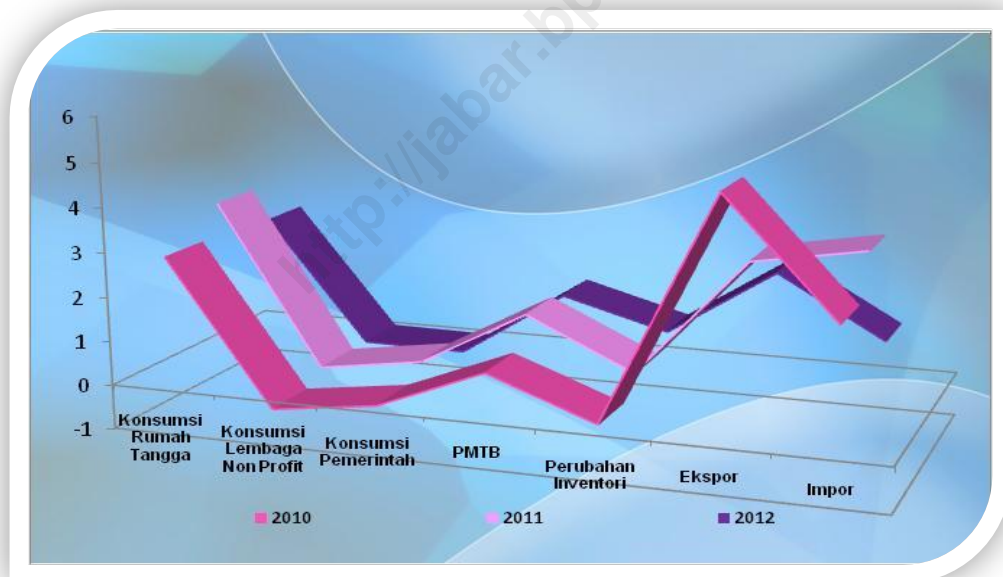
Sementara itu, andil komponen perubahan inventori selama periode 2010-2012 berturut-turut menunjukkan kecenderungan yang meningkat, tercatat pada tahun 2010 sebesar 0,12 persen dan 0,91 persen di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun tiga tahun terakhir (2010-2012) keberlangsungan proses produksi di Jawa Barat terjamin karena komponen inventori yang memberikan sumbangan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Selama periode tiga tahun (2010-2012) komponen ekspor barang dan jasa memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,

namun demikian memiliki kecenderungan yang semakin mengecil, seiring melemahnya permintaan dari negara tujuan ekspor akibat krisis global. Keadaan ini sejalan dengan laju pertumbuhan komponen ekspor selama periode tersebut yang mengalami perlambatan. Tercatat andil ekspor pada tahun 2010 sebesar 5,15 persen dan pada tahun 2012 andil komponen ini mengecil menjadi sebesar 2,47 persen.

Selanjutnya Komponen impor yang merupakan faktor pengurang ekonomi, maka andil positif berarti menjadi pengurang bagi LPE. Tercatat sumbangan negatif komponen impor yang terbesar terjadi pada tahun 2011, yakni sebesar 3,65 persen, kemudian mengecil di tahun 2012 menjadi sebesar 1,12 persen.

Grafik 26.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2012 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

3.8. Kesimpulan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat yang dihitung atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp 946,86 triliun, sedangkan atas dasar

harga konstan mencapai Rp. 364,41 triliun. Kinerja Perekonomian Jawa Barat yang dicerminkan oleh LPE mengalami pertumbuhan sebesar 6,21 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LPE tahun 2012 mengalami perlambatan, dimana perekonomian tahun 2011 tumbuh sebesar 6,48 persen. Melambatnya perekonomian Jawa Barat Tahun 2012 tersebut merupakan dampak dari krisis yang terjadi di zona eropa yang menyebabkan melambatnya kinerja ekspor Jawa Barat.

Selama kurun tiga tahun (2010-2012), pola pengeluaran di Jawa Barat masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, dengan *trend* yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 porsi komponen Konsumsi rumahtangga tercatat sebesar 60,68 persen dan mengalami penurunan menjadi 58,23 persen di tahun 2012. Kendati demikian, secara absolut nilai konsumsi rumahtangga dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan cukup relatif tinggi, ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kenaikan harga barang dan jasa. Dari sisi kuantitas, besaran konsumsi rumahtangga tahun 2012 yang dihitung atas dasar harga konstan telah mencapai Rp. 225,49 triliun, atau mengalami peningkatan kuantitas sebesar 4,49 persen dari tahun 2011 yang mencapai Rp. 215,80 triliun.

Nilai konsumsi Lembaga non profit yang melayani rumahtangga (LNPRT) relatif sangat kecil dibandingkan dengan komponen lainnya, dimana pada tahun 2012 nilai komponen ini sebesar Rp. 3,86 triliun, atau dengan porsi yang hanya sebesar 0,41 persen terhadap PDRB di Jawa Barat. Dari sisi kuantitas komponen pengeluaran lembaga non profit yang melayani rumahtangga tumbuh sebesar 4,57 persen, atau dari nilai pengeluaran atas dasar harga konstan sebesar Rp.1,88 triliun di tahun 2010 menjadi Rp. 1,96 triliun.

Setelah mengalami peningkatan share di tahun 2011, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2012 kemengalami sedikit

penurunan porsi terhadap PDRB, yakni dari 8,90 persen ditahun 2011 menjadi 8,78 persen ditahun 2012. Dari sisi kuantitas, pertumbuhan komponen Konsumsi Pemerintah pada tahun 2012 mengalami perlambatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari pertumbuhan sebesar 6,48 ditahun 2011 menjadi hanya sebesar 0,01 persen.

Secara nominal, besaran PMTB selama periode tahun 2010-2012 terus mengalami peningkatan, yakni dari Rp. 134,50 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi Rp. 175,20 triliun rupiah tahun 2012. Sementara itu, apabila dilihat secara riil (tanpa pengaruh inflasi), kuantitas komponen PMTB juga terus mengalami pertumbuhan positif selama periode yang sama. Laju Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011, yakni sebesar 9,77 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan kuantitas PMTB mengalami perlambatan, namun dengan level yang masih relatif tinggi, yaitu sebesar 8,72 persen. Dibandingkan dengan komponen konsumsi dan ekspor, pertumbuhan komponen PMTB relatif lebih tinggi selama periode 2010-2012. Kondisi tersebut menyebabkan share komponen PMTB terus mengalami peningkatan pada periode tersebut, yakni dari 17,43 persen menjadi 18,50 persen. Dari sisi jenis barang, Proporsi terbesar PMTB di Jawa Barat selama kurun waktu 2010-2012 masih didominasi oleh bangunan yang diperkirakan memberikan kontribusi di atas 50 persen dari total PMTB, kemudian disusul mesin, transportasi, dan perlengkapan lainnya.

Seperti PMTB, laju pertumbuhan kuantitas perubahan inventori selama periode 2010-2012 relatif tinggi dibanding komponen-komponen lainnya. Pada tahun 2011 kuantitas perubahan inventori mengalami pertumbuhan sebesar 17,10 persen, dan meningkat cukup signifikan pada tahun berikutnya dengan laju pertumbuhan sebesar 24,54 persen. Sementara itu, sampai dengan tahun 2012 kontribusi perubahan inventori mencapai 5,12 persen terhadap PDRB, atau terus mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Selanjutnya dari sisi neraca perdagangan yang tergambar dari komponen ekspor impor, setelah mengalami penurunan surplus perdagangan, di tahun 2012 posisi neraca perdagangan Jawa Barat kembali Secara nominal pada kurun waktu 2010-2012 posisi Jawa Barat mengalami peningkatan surplus perdagangan, yakni dengan ekspor netto sebesar Rp. 45,46 triliun, dimana tahun sebelum sebesar Rp. 40,84 triliun. Kendati demikian, peningkatan ekspor netto Jawa Barat pada tahun 2012 tersebut bukan didongkrak oleh kenaikan kinerja ekspor Jawa Barat, namun lebih di sebabkan oleh melambatnya kinerja impor akibat melemahnya perekonomian global yang mengakibatkan menurunnya produksi negara-negara exportir ke Indonesia khususnya Jawa Barat. Secara kuantitas, pada tahun 2012 pertumbuhan ekspor Jawa Barat mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dengan laju pertumbuhan 5,52 persen setelah tumbuh sebesar 7,28 persen pada tahun 2010. Demikian pula dengan kuantitas impor yang merupakan komponen pengurang, juga mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan dengan tingkat perlambatan yang lebih besar. Pada tahun 2011 kuantitas impor di Propinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan sangat tinggi, yakni sebesar 11,65 persen, namun demikian, krisis zona eropqa yang terjadi ditahun 2011 telah menyebabkan perlambatan kuantitas impor yang cukup signifikan di Propinsi Jawa Barat, yakni dengan pertumbuhan menjadi sebesar 3,42 persen.

Selama periode 2010-2012 perekonomian Jawa Barat masih tampak di drive oleh komponen konsumsi rumah tangga. Hal ini tampak dari andil komponen ini terhadap LPE tercatat yang tertinggi pada periode tersebut. Dari LPE sebesar 6,21 persen ditahun 2012, andil konsumsi rumah tangga mencapai 2,83 persen. Sumber pertumbuhan lain yang cukup dominan adalah ekspor dengan andil terhadap LPE sebesar 2,47 persen pada tahun 2012. Selanjutnya komponen PMTB dan perubahan inventori masing-masing memberikan andil 1,55 pesen dan 0,91 persen. Kemudian andil pengeluaran LNPRT terhadap LPE tercatat

sebesar 0,02 persen. Sementara itu, pada tahun 2012 komponen konsumsi pemerintah hampir tidak memberikan andil terhadap LPE di Jawa Barat pada tahun 2012 setelah di tahun sebelumnya memberikan andil sebesar 0,38 persen dari LPE sebesar 6,48 persen.

<http://jabar.bps.go.id>

Tabel-tabel Pokok
PDRB Provinsi Jawa Barat
Menurut Penggunaan Tahun 2010-2012

<http://jabar.bps.go.id>

Lampiran 1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2010-2012
(Juta Rupiah)

Uraian	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	468,201,172.55	510,187,921.23	551,404,348.16
a. Makanan	253,489,713.89	274,837,301.85	298,382,700.46
b. Bukan Makanan	214,711,458.66	235,350,619.38	253,021,647.70
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	3,385,128.51	3,556,229.43	3,864,741.76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	66,915,973.18	76,610,187.98	83,123,604.43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	134,500,300.66	153,905,249.49	175,201,065.80
5. Perubahan Inventori	30,343,120.03	39,453,621.17	48,468,148.56
Diskrepansi	12,527,099.61	21,633,754.13	15,465,676.84
6. Ekspor :	274,297,190.36	305,330,654.95	340,280,727.23
a. Antar Negara	211,786,258.96	225,030,857.82	248,130,380.09
b. Antar Provinsi	47,697,569.45	65,742,078.52	75,645,740.05
c. Jasa	14,813,361.95	14,557,718.60	16,504,607.09
7. Impor :	218,576,124.42	249,695,626.20	270,947,541.98
a. Antar Negara	100,648,080.56	132,150,596.83	127,642,061.13
b. Antar Provinsi	90,642,185.57	87,917,885.80	111,155,374.04
c. Jasa	27,285,858.29	29,627,143.57	32,150,106.81
P D R B	771,593,860.48	860,981,992.17	946,860,770.81

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2010-2012
(Juta Rupiah)

Uraian	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	203,968,382.74	215,796,706.66	225,491,313.31
a. Makanan	111,840,301.09	117,935,797.66	123,051,712.40
b. Bukan Makanan	92,128,081.65	97,860,908.99	102,439,600.91
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	1,796,077.43	1,876,056.60	1,961,737.33
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18,782,749.65	19,999,945.08	20,002,864.06
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	55,560,297.78	60,989,348.25	66,306,963.63
5. Perubahan Inventori	10,858,526.86	12,714,889.20	15,835,429.80
Diskrepansi	-10,924,747.07	-9,104,410.77	-10,656,305.87
6. Ekspor :	143,201,750.16	153,628,213.90	162,112,646.91
a. Antar Negara	119,241,164.30	123,672,605.08	128,644,371.26
b. Antar Provinsi	17,997,258.04	24,589,691.46	27,437,565.04
c. Jasa	5,963,327.82	5,365,917.36	6,030,710.61
7. Impor :	101,019,220.76	112,789,505.74	116,649,243.50
a. Antar Negara	45,778,037.74	59,559,755.22	56,561,308.21
b. Antar Provinsi	42,520,359.48	39,938,069.31	48,524,656.57
c. Jasa	12,720,823.54	13,291,681.21	11,563,278.72
P D R B	322,223,816.79	343,111,243.18	364,405,405.68

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 3.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2010-2012
(Persen)

Uraian	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60.68	59.26	58.23
a. Makanan	54.14	53.87	54.11
b. Bukan Makanan	45.86	46.13	45.89
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0.44	0.41	0.41
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.67	8.90	8.78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.43	17.88	18.50
5. Perubahan Inventori	3.93	4.58	5.12
Diskrepansi	1.62	2.51	1.63
6. Ekspor :	35.55	35.46	35.94
a. Antar Negara	27.45	26.14	26.21
b. Antar Provinsi	6.18	7.64	7.99
c. Jasa	1.92	1.69	1.74
7. Impor :	28.33	29.00	28.62
a. Antar Negara	13.04	15.35	13.48
b. Antar Provinsi	11.75	10.21	11.74
c. Jasa	3.54	3.44	3.40
P D R B	100.00	100.00	100.00

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 4.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas
Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2010-2012
(Persen)

Uraian	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	63.30	62.89	61.88
a. Makanan	54.83	54.65	54.57
b. Bukan Makanan	45.17	45.35	45.43
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	0.56	0.55	0.54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.83	5.83	5.49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.24	17.78	18.20
5. Perubahan Inventori	3.37	3.71	4.35
Diskrepansi	-3.39	-2.65	-2.92
6. Ekspor :	44.44	44.78	44.49
a. Antar Negara	37.01	36.04	35.30
b. Antar Provinsi	5.59	7.17	7.53
c. Jasa	1.85	1.56	1.65
7. Impor :	31.35	32.87	32.01
a. Antar Negara	14.21	17.36	15.52
b. Antar Provinsi	13.20	11.64	13.32
c. Jasa	3.95	3.87	3.17
P D R B	100.00	100.00	100.00

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 5.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan
Tahun 2010-2012 (Persen)

Uraian	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.48	8.97	8.08
a. Makanan	9.65	8.42	8.57
b. Bukan Makanan	9.28	9.61	7.51
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	-33.04	5.05	8.68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15.03	14.49	8.50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.55	14.43	13.84
5. Perubahan Inventori	18.10	30.02	22.85
Diskrepansi	40.29	72.70	-28.51
6. Ekspor :	11.86	11.31	11.45
a. Antar Negara	12.32	6.25	10.27
b. Antar Provinsi	12.51	37.83	15.06
c. Jasa	3.87	-1.73	13.37
7. Impor :	10.80	14.24	8.51
a. Antar Negara	22.66	31.30	-3.41
b. Antar Provinsi	0.26	-3.01	26.43
c. Jasa	10.02	8.58	8.52
P D R B	11.85	11.58	9.97

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 6.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2010-2012 (Persen)

Uraian	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.56	5.80	4.49
a. Makanan	4.06	5.45	4.34
b. Bukan Makanan	5.18	6.22	4.68
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	-33.96	4.45	4.57
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.42	6.48	0.01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.74	9.77	8.72
5. Perubahan Inventori	3.45	17.10	24.54
Diskrepansi	1.43	-16.66	17.05
6. Ekspor :	12.25	7.28	5.52
a. Antar Negara	12.37	3.72	4.02
b. Antar Provinsi	20.61	36.63	11.58
c. Jasa	-8.89	-10.02	12.39
7. Impor :	8.71	11.65	3.42
a. Antar Negara	20.73	30.11	-5.03
b. Antar Provinsi	-1.89	-6.07	21.50
c. Jasa	8.96	4.49	-13.00
P D R B	6.20	6.48	6.21

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 7.
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut Penggunaan Tahun 2010-2012 (Tahun 2000 = 100)
(Persen)

Uraian	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	229.55	236.42	244.53
a. Makanan	226.65	233.04	242.49
b. Bukan Makanan	233.06	240.50	247.00
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	188.47	189.56	197.01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	356.26	383.05	415.56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	242.08	252.35	264.23
5. Perubahan Inventori	279.44	310.29	306.07
Diskrepansi	-114.67	-237.62	-145.13
6. Ekspor :	191.55	198.75	209.90
a. Antar Negara	177.61	181.96	192.88
b. Antar Provinsi	265.03	267.36	275.70
c. Jasa	248.41	271.30	273.68
7. Impor :	216.37	221.38	232.28
a. Antar Negara	219.86	221.88	225.67
b. Antar Provinsi	213.17	220.14	229.07
c. Jasa	214.50	222.90	278.04
P D R B	239.46	250.93	259.84

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 8.
Inflasi Tahun 2010-2012
(Persen)

Uraian	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.71	2.99	3.43
a. Makanan	5.37	2.82	4.05
b. Bukan Makanan	3.90	3.19	2.70
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	1.38	0.58	3.93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.55	7.52	8.49
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.28	4.24	4.71
5. Perubahan Inventori	14.17	11.04	-1.36
Diskrepansi	38.31	107.22	-38.92
6. Ekspor :	-0.35	3.76	5.61
a. Antar Negara	-0.05	2.45	6.00
b. Antar Provinsi	-6.71	0.88	3.12
c. Jasa	14.00	9.22	0.88
7. Impor :	1.93	2.32	4.92
a. Antar Negara	1.59	0.92	1.71
b. Antar Provinsi	2.18	3.27	4.06
c. Jasa	0.97	3.92	24.74
P D R B	5.32	4.79	3.55

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

Lampiran 9.
Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010-2012 (jutaan rupiah)

Uraian	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.93	3.67	2.83
a. Makanan	2.24	2.99	2.37
b. Bukan Makanan	2.33	2.81	2.12
2. Pengeluaran Konsumsi LNP	-0.30	0.02	0.02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.03	0.38	0.00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0.99	1.68	1.55
5. Perubahan Inventori	0.12	0.58	0.91
Diskrepansi	-0.05	0.56	-0.45
6. Ekspor :	5.15	3.24	2.47
a. Antar Negara	4.33	1.38	1.45
b. Antar Provinsi	1.01	2.05	0.83
c. Jasa	-0.19	-0.19	0.19
7. Impor :	2.67	3.65	1.12
a. Antar Negara	2.59	4.28	-0.87
b. Antar Provinsi	-0.27	-0.80	2.50
c. Jasa	0.34	0.18	-0.50
P D R B	6.20	6.48	6.21

^{*)} Angka Diperbaiki

^{**)} Angka Sementara

<http://jabar.bps.go.id>

Jl. P.H. Hasan Mustafa No.43 telp. (022) 7272595-701696
Fax (022)7213572 Bandung 40124 E-mail bps3200@mailhost.bps.go.id
Home Page <http://jabar.go.id>